KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA

POLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

T.A. 2024

PONTIANAK, 30 AGUSTUS 2023

DAFTAR ISI

Halaman

I. Latar Belakang 1

1. Kondisi Umum 1
   a. Perkembangan lingkungan strategi Kalbar 7
   b. Analisis 75
2. Identifikasi Masalah 81

II. Tujuan dan Sasaran 82

1. Visi dan Misi Polda kalbar 82
   a. visi Polda Kalbar 82
   b. misi Polda Kalbar 82
2. Visi dan Misi Polresta Pontianak 82
   a. visi Polda Kalbar 82
   b. misi Polda Kalbar 82
3. Tujuan Jangka Menengah 83
   a. Tujuan Jangka Menengah Polda Kalbar 83
   b. Tujuan Jangka Menengah Polda Kalbar 83
4. Sasaran Prioritas 83
   a. Sasaran Prioritas Polda Kalbar T.A. 2024 84
   b. Sasaran Prioritas Polresta Pontianak T.A. 2024 84

III. Program Perioritas Nasional dan Arah Bijak Polri Tahun 2024..... 84

1. Program Kebijakan dan Strategi Polda kalbar T.A. 2024 84
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polresta Pontianak T.A. 2024 93

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polresta Pontianak T.A. 2024 100

1. Program dan Kegiatan 100
2. Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2024 104

V. P e n u t u p 106

LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRESTA PONTIANAK T.A. 2024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK
Nomor : Kep/ 40 /VIII/2023

Tentang

RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK POLDA KALBAR
T.A. 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
9. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2023 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

Memperhatikan……

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/979/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/228/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.
5. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor: Kep/04/V/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Strategis kepolisian Resor Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK POLDA KALBAR TENTANG REVISI RENCANA KERJA TAHUN 2024

1. rencana Kerja Kepolisian Resor Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman revisi penyusunan Rencana Kerja dan anggaran masing-masing satuan;
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

ADHE HARIADI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

Tembusan:

1. Kapolda Kalbar.
2. Wakapolda kalbar
3. Karorena Polda Kalbar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK POLDA KALBAR T.A. 2024

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Bangsa Indonesia terus berkembang dinamis, maka potensi dan ancaman terhadap gangguan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) masih terus akan mengikuti, bahkan kecenderungannya meningkat yang akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional. Kondisi keamanan dalam negeri Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan strategi global yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas dan ketidakaturan atau secara universal dikenal dengan Istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity*, dan *Ambiguity*). Konsep VUCA digunakan untuk menyoroti tantangan yang dihadapi oleh organisasi, pemimpin, dan individu dalam menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan kompleks, termasuk gangguan keamanan dalam negeri (Kamdagri).

Gangguan Kamdagri yang semula hanya berupa pelanggaran hukum dan aksi-aksi kejahatan biasa atau kejahatan konvensional, namun dalam perkembangannya dimensi kejahatan semakin kompleks dengan adanya kejahatan luar biasa yang terorganisir (*Extra Ordinary Organized Crime*) dan lintas negara.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Era Revolusi 4.0, keamanan dalam negeri juga kini menghadapi ancaman berdimensi teknologi siber (*Cyber Crime*). Dalam interaksi antar manusia dengan adanya teknologi digital menjadi lebih cepat, massif dan lebih penetratif. Kondisi tersebut berdampak pada situasi ketidakteraturan arus informasi yang berimplikasi pada semakin membawa masyarakat terjebak pada fenomena *post truth* dengan adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*).

Ancaman keamanan berdimensi Teknologi dan Informasi saat ini juga berkorelasi dengan ancaman berdimensi ideologi dan politik global bersifat

bersifat…..

transnasional yang berpotensi mengganggu kondisi Keamanan Dalam Negeri antara lain penyebaran ideologi radikalisme dan paham-paham lainnya yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan dengan memperhatikan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 adalah:

a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
c. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
e. memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
f. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
g. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Peran Polri dalam mendukung kebijakan prioritas nasional adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yaitu menjaga keamanan stabilitas nasional melalui:

a. penguatan keamanan dalam negeri
    1) peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme;
    2) pengamanan objek vital dan target rentan;
    3) penguatan pertahanan dan keamanan diperbatasan dan pulau terluar;
    4) penanganan konflik secara humanis;
    5) keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana.
b. penguatan keamanan laut
    1) penguatan kapasitas operasi keamanan laut;

b.penguatan…..

2) peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut.

c. penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat

1) pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
2) penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya;
3) peningkatan layanan Kepolisian yang presisi sebagai kelanjutan promoter;
4) pengadaan Almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian;
5) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri.

d. penguatan keamanan dan keamanan siber

1) penguatan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan Siber;
2) penyelesaian kejahatan Siber.

Terkait peran Polri dalam mendukung kebijakan prioritas nasional, pada tahun 2024 merupakan tahun politik. Berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2022, Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Oleh karenanya jajaran Polri sudah mempersiapkan pengamanan Pemilu mulai dari tahapan sampai dengan pasca Pemilu.

Polresta Pontianak Polda Kalbar sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dengan menjaga dan memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) khususnya di kota pontianak harus mampu bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai strategi dan program pemolisian untuk mewujudkan keamanan di Kota Pontianak demi terselenggaranya Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keberhasilan yang dicapai oleh Polresta Pontianak Polda Kalbar tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polresta Pontianak Polda Kalbar dengan didukung

didukung…..

oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polresta Pontianak Polda Kalbar dari pemerintah/swasta/ masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polresta Pontianak Polda Kalbar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polresta Pontianak Polda Kalbar diharapkan dapat membuat Polresta Pontianak Polda Kalbar semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polresta Pontianak Polda Kalbar untuk senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah:

a. Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian;
b. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
c. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
d. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada periode kepemimpinan 2021-2024 telah menetapkan tagline “Transformasi Menuju Polri Yang Presisi” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) yang dikuti oleh seluruh Kepolisian jajaran termasuk Polda Kalbar. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari kepemimpinan Polri sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*Problem Oriented Policing*).

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan Kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Mengacu pada Rencana Kerja Polda Kalbar T.A. 2023, Polresta Pontianak Polda Kalbar telah menyusun Rencana Kerja (Renja) polresta Pontianak Polda Kalbar T.A 2024, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Polresta Pontianak Polda Kalbar Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan Renja dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Renja Polresta Pontianak Polda Kalbar T.A. 2024 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Dalam penyusunan Renja Polresta Pontianak Polda Kalbar T.A 2024 sejalan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/ 2024 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kota Pontianak merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Renja Polresta Pontianak Polda Kalbar Tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi perkembangan lingkungan strategis meliputi aspek kehidupan masyarakat di daerah kota Pontianak yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam).

keamanan…..

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polresta Pontianak Polda Kalbar yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Lingkungan Strategi Kalbar

1. geografi

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 118,31 km^2 yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu terletak pada 0^o 02' 24" Lintang Utara sampai dengan 0^o 05' 37" Lintang Selatan, dan 109^o 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109^o 2

Lintang…..

Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,71 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen).

Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kalimantan Barat sehingga segala kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dipusatkan di Kota Pontianak. Dengan kondisi wilayah hukum Polresta Pontianak sebagai pusat kegiatan masyarakat maka berimplikasi terhadap meningkatnya potensi gangguan kamtibmas seperti penyelundupan barang illegal, unjuk rasa, keributan/tindakan anarkis, rusuh massa dan berbagai macam tindak pidana

pidana…..

Kondisi iklim yang tidak menentu, kondisi wilayah yang merupakan dataran rendah dan kondisi drainase kota yang kurang tertata dengan baik menyebabkan wilayah hukum Polresta Pontianak rawan terjadi bencana alam seperti banjir rob dan angin puting beliung. Selain itu, kondisi tanah di sebagian wilayah Kota Pontianak merupakan tanah gambut sehingga rawan terjadi kebakaran lahan pada saat musim kemarau. Wilayah yang rawan terjadi banjir rob yaitu Kec. Pontianak Selatan, Kec. Pontianak Barat, Kec. Pontianak Kota, dan Kec. Pontianak Timur. Wilayah yang sering terjadi bencana angin puting beliung yaitu Kec. Pontianak dan Kec. Pontianak Utara. Wilayah yang memiliki lahan gambut dan rawan terjadi kebakaran lahan yaitu Kec. Pontianak Selatan dan Kec. Pontianak Tenggara.

2. Pembagian daerah

a) Kecamatan Pontianak Utara terdiri dari 4 Kelurahan (Sumber : Kec.Pontianak Utara Dalam Angka 2023)

NO	KELURAHAN	LUAS /KM²	JUMLAH	
			RT	RW
1	SIANTAN HULU	9,20	166	39
2	SIANTAN TENGAH	7,87	132	33
3	SIANTAN HILIR	13,70	151	40
4	BATU LAYANG	6,45	91	20
	JUMLAH	37.22	540	132

b) Kecamatan Pontianak Barat terdiri dari 4 Kelurahan (Sumber : Kec.Pontianak Barat Dalam Angka 2023)

NO	KELURAHAN	LUAS / Km²	JUMLAH	
			RT	RW
1	PAL LIMA	5,18	72	11
2	SEI. JAWI LUAR	2,96	156	29
3	SEI. JAWI DALAM	2,43	133	27
4	SEI BELIUNG	5,67	195	37
	JUMLAH	16,24	556	104

c) Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari 5 kelurahan (Sumber :Kec. Pontianak Selatan Dalam Angka 2023)

NO	KELURAHAN	LUAS / M^2	JUMLAH	
			RT	RW
1	PARIT TOKAYA	6.47	72	15
2	BENUA MELAYU DARAT	2.67	154	35
3	BENUA MELAYU LAUT	0.84	41	11
4	KOTA BARU	3,37	75	16
5	AKCAYA	3.17	72	15
	JUMLAH	16,52	414	92

d) Kecamatan Pontianak Tenggara terdiri dari 4 kelurahan (Sumber :Kec. Pontianak Tenggara Dalam Angka 2023)

NO	KELURAHAN	LUAS / KM^2	JUMLAH	
			RT	RW
1	BANGKA BELITUNG LAUT	2.46	54	15
2	BANGKA BELITUNG DARAT	2.93	60	15
3	BANSIR LAUT	2.80	38	9
4	BANSIR DARAT	7.99	38	8
	JUMLAH	16,18	190	47

a) Kecamatan Pontianak Timur terdiri dari 7 kelurahan (Sumber : Kec.Pontianak Timur Angka 2023)

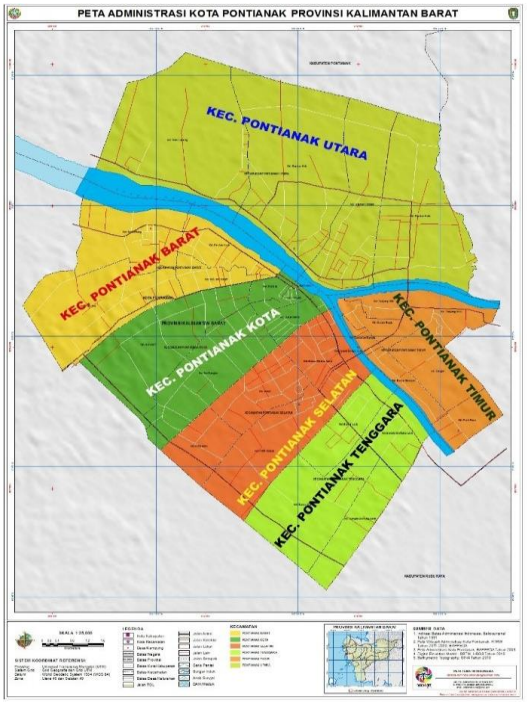
NO	KELURAHAN	LUAS / Km^2	JUMLAH	
			RT	RW
1	PARIT MAYOR	1,86	36	8
2	BANJAR SERASAN	1,41	44	8
3	SAIGON	3,4	93	23
4	TANJUNG HULU	2,4	89	18
5	TANJUNG HILIR	1,1	41	10
6	DALAM BUGIS	1,29	80	16
7	TAMBELAN SAMPIT	0,41	32	8
	JUMLAH	11,87	415	91

b) Kecamatan Pontianak Kota terdiri dari 5 kelurahan (Sumber : Kec.Pontianak Kota Dalam Angka 2023)

NO	KELURAHAN	LUAS / Km^2	JUMLAH	
			RT	RW
1	SEI BANGKONG	6.20	212	43
2	DARAT SEKIP	1,31	56	17
3	TENGAH	0,95	38	9
4	MARIANA	0,50	44	10
5	SEI JAWI	7,02	166	41
	JUMLAH	15,98	516	120

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

Peta Kota Pontianak



3. Hidrologi

(1). aliran sungai yang ada di wilayah hukum Polresta Pontianak bermuara dilaut Natuna, yaitu Sungai Kapuas.

(2). Sungai – sungai yang berada diwilayah hukum Polresta Pontianak merupakan Urat Nadi perhubungan / transportasi beberapa kalangan masyarakat pada waktu air Pasang.

(3). Keadaan sungai – sungai yang berada di wilayah hukum Polresta Pontianak berkisar antara 16 m s/ d 30 m dan lebar mencapai kurang lebih 350 m dan dapat dilayari oleh kapal – kapal yang berbobot ± 50 Ton (sungai Kapuas Besar, Kapuas kecil dan sungai landak sampaikearah Ngabang).

(4). Kota Pontianak terbagi menjadi 3 (tiga) bagian karena dipecahkan oleh aliran sungai yaitu Aliran Sungai Kapuas dan Aliran sungai Landak. Ketiga bagian Kota tesebut dihubungkan oleh 3 (tiga) buah Jembatan yaitu jembatan Tol Kapuas I, Jembatan Tol Landak 1 dan 2 serta dibantu oleh Penyebrangan Ferry, Perahu Motor dan Perahu sampan.

(5). Sungai / Parit diwilayah hukum Polresta Pontianak adalah

sebagai berikut :

a) Wilayah Pontianak Utara.

(1) Parit Jawa.
(2) Parit Makmur
(3) Parit Malaya.
(4) Parit Nanas
(5) Parit Pangeran
(6) Parit Sungai Kunyit
(7) Parit Sungai Putat
(8) Parit Sungai Sahang
(9) Parit Sungai Selamat
(10) Parit Wan Salim
(11) Sungai Kapuas Besar
(12) Sungai Landak
(13) Sungai Kuning
(14) Parit Pak Kacong
(15) Sungai Durhaka
(16) Parit Pekong
(17) Parit Lie
(18) Parit Belanda
(19) Parit Cekwa
(20) Sungai Pandan
(21) Parit Pangeran II

b) Wilayah Pontianak Barat.

(1) Sungai Parit Jawi
(2) Sungai Nipah Kuning
(3) Parit Sungai Kapuas
(4) Sungai Kapuas Besar
(5) Parit Labala
(6) Sungai Sero
(7) Parit Tengah
(8) Sungai Beliung
(9) Sungai Selamat

c) Wilayah Pontianak Selatan

(1) Parit Bansir
(2) Parit Besar
(3) Parit Tokaya
(4) Sungai Kapuas Kecil

d) Wilayah Pontianak Tenggara

(1) Parit Bangka

(1) Parit Bangka…..

(2) Parit H. Husin
(3) Sungai Raya

e) Wilayah Pontianak Timur.

(1) Parit Bating
(2) Parit Daeng Lasibek
(3) Parit H. Yusuf Karim
(4) Parit Jepon
(5) Parit Kongsi
(6) Parit Langgar
(7) Parit Mayor
(8) Parit Pangeran Pati
(9) Parit semerangkai
(10) Parit Tambelan
(11) Parit Wan Bakar Kapur
(12) Parit H. Yusuf
(13) Parit Jalil
(14) Parit Norman
(15) Sungai Kapuas Kecil
(16) Sungai Landak
(17) Sungai Kapitan
(18) Sungai Jenggot
(19) Sungai Kapuas Besar

4. Iklim

a) Hasil pencatatan dari Statistik Meteorologi Supadio Pontianak menunjukan bahwa rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak dan sekitarnya adalah 2,3 Knots, sedangkan temperatur suhu udara rata-rata berkisar antara 20,8 °C, sedangkan suhu maksimum mencapai 35,6 °C dan rata-rata tekanan udara sebesar 1011,0 milibar.

b) Hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sekitar 299,7 mm.

c) Temperatur / Keadaan Suhu :

a. Rata-rata : 27,5º Celcius
b. Temperatur Maksimal : 34,3º Celcius
c. Temperatur Minimum : 22,6º Celcius

d) Lembab Nisbi berkisar antara 84 % sampai 95% dengan rata – rata 95%, lembab nisbi yang terlembat terjadi pada bulan Februari sebesar 95 %.

e) Tekanan Udara rata – rata 4 mili Bar sepanjang hari.

f) Keadaan kabut terjadi pada Pagi hari dan malam hari pada bulan Juli dan bulan Agustus (kemarau Panjang), sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas darat, laut maupun udara.

g) Awan umumnya terjadi sepanjang hari.

h) Keadaan iklim diwilayah Hukum Polresta Pontianak termasuk beriklim Tropis dengan suhu yang tertinggi (Berkisar antara 28 – 32 derajat celcius dan suhu rata – rata pada siang hari 30 derajat celcius).

5. Angin

Rata-rata kecepatan angin Kota Pontianak sebesar 2,3 knot dengankecepatan angin terbesar terjadi pada bulan April yaitu sebesar 29 knot.

6. Topografi

Kondisi tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Wilayah yang memiliki lahan gambut dan rawan terjadi kebakaran lahan yaitu Kec. Pontianak Selatan dan Kec. Pontianak Tenggara.

7. Demografi

a) Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan data

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

Badan Pusat Statisti Kota Pontianak semester 1 tahun 2023.

NO	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	**PONTIANAK SELATAN**	**45.970**	**46.904**	**92.874**
	BENUAMELAYU LAUT	4.447	4.551	8.998
	BENUAMELAYU DARAT	12.743	13.303	26.046
	PARITTOKAYA	9.450	9.572	19.022
	KOTABARU	10.379	10.181	20.560
	AKCAYA	8.951	9.297	18.248
2	**PONTIANAK TIMUR**	**54.504**	**53.892**	**108.396**
	PARITMAYOR	5.492	5.412	10.904
	BANJAR SERASAN	6.454	6.417	12.871
	SAIGON	13.529	13.268	26.797
	TANJUNG HULU	9.991	9.890	19.881
	TANJUNG HILIR	5.847	5.738	11.585
	DALAMBUGIS	9.406	9.314	18.720
	TAMBELANSAMPIT	3.785	3.853	7.638
3	**PONTIANAK BARAT**	**75.518**	**75.490**	**151.008**
	PALLIMA	9.901	9.943	19.844
	SUNGAIJAWI DALAM	16.446	16.598	33.044
	SUNGAIJAWI LUAR	19.676	19.789	39.465
	SUNGAIBELIUNG	29.495	29.160	58.655
4	**PONTIANAK UTARA**	**74.448**	**72.459**	**146.907**
	SIANTAN HULU	23.944	23.399	47.343
	SIANTAN TENGAH	19.069	18.408	37.477
	SIANTAN HILIR	17.952	17.536	35.488
	BATULAYANG	13.483	13.116	26.599
5	**PONTIANAK KOTA**	**63.254**	**64.572**	**127.826**
	SUNGAIBANGKONG	26.267	26.874	53.141
	DARATSEKIP	4.575	4.730	9.305
	TENGAH	3.698	3.667	7.365
	MARIANA	4.169	4.346	8.515
	SUNGAIJAWI	24.545	24.955	49.500
6	**PONTIANAK TENGGARA**	**24.360**	**24.725**	**49.085**
	BANSIR LAUT	5.042	5.119	10.161
	BANSIR DARAT	5.253	5.303	10.556
	BANGKABELITUNG LAUT	6.948	6.951	13.899
	BANGKABELITUNG DARAT	7.117	7.352	14.469
KOTA PONTIANAK		**338.054**	**338.042**	**676.096**

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

Jumlah penduduk Kota Pontianak Menurut agama berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak semester 1 tahun 2023 :

NO	Wilayah	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU	KEPERCAYAAN
1	PONTIANAK SELATAN	51.226	7.523	11.280	14	22.197	634	0
	BENUAMELAYU LAUT	4.999	458	909	4	2.572	56	0
	BENUAMELAYU DARAT	6.544	2.500	4.311	5	12.339	347	0
	PARITTOKAYA	9.866	2.130	2.943	2	3.932	149	0
	KOTABARU	16.891	1.022	1.309	0	1.294	44	0
	AKCAYA	12.926	1.413	1.808	3	2.060	38	0
2	PONTIANAK TIMUR	96.399	3.247	3.420	62	5.084	184	0
	PARITMAYOR	9.873	291	307	19	393	21	0
	BANJAR SERASAN	12.655	53	68	1	92	2	0
	SAIGON	23.411	1.096	1.038	17	1.223	12	0
	TANJUNG HULU	13.762	1.556	1.738	25	2.683	117	0
	TANJUNG HILIR	11.314	69	75	0	127	0	0
	DALAMBUGIS	17.969	140	172	0	414	25	0
	TAMBELANSAMPIT	7.415	42	22	0	152	7	0
3	PONTIANAK BARAT	132.451	4.932	5.965	47	7.409	200	4
	PALLIMA	18.417	391	480	0	552	0	4
	SUNGAIJAWI DALAM	29.518	746	1.121	0	1.617	42	0
	SUNGAIJAWI LUAR	33.238	1.535	1.553	37	2.998	104	0
	SUNGAIBELIUNG	51.278	2.260	2.811	10	2.242	54	0
4	PONTIANAK UTARA	103.099	7.521	7.822	64	26.638	1.762	1
	SIANTAN HULU	32.594	3.419	3.104	31	7.642	552	1
	SIANTAN TENGAH	22.031	1.863	1.447	18	11.771	347	0
	SIANTAN HILIR	26.949	1.173	1.481	7	5.279	599	0
	BATULAYANG	21.525	1.066	1.790	8	1.946	264	0
5	PONTIANAK KOTA	102.092	5.984	8.151	53	11.290	256	0
	SUNGAIBANGKONG	43.464	2.874	3.217	24	3.478	84	0
	DARATSEKIP	3.646	601	1.841	1	3.166	50	0
	TENGAH	4.465	539	805	1	1.518	37	0
	MARIANA	6.142	498	644	2	1.206	23	0
	SUNGAIJAWI	44.375	1.472	1.644	25	1.922	62	0
6	PONTIANAK TENGGARA	36.605	3.593	3.596	76	5.091	123	1
	BANSIR LAUT	7.970	466	608	2	1.103	12	0
	BANSIR DARAT	8.625	649	686	9	562	25	0
	BANGKABELITUNG LAUT	10.760	884	757	7	1.451	40	0
	BANGKABELITUNG DARAT	9.250	1.594	1.545	58	1.975	46	1
KOTA PONTIANAK		521.872	32.800	40.234	316	77.709	3.159	6

b) Penyebaran Penduduk

Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pontianak Barat sebanyak151.008 jiwa atau 22,36 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan Kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan jumlah penduduk sebanyak 49.085 jiwaatau 7,28 persen dari total jumlah penduduk.

penduduk…..

c) Konsentasi penduduk

1) Suku Melayu

Tersebar di pinggiran kota Pontianak dan daerah tepian Sungai Kapuas, mata pecaharianya pada umumnya adalah petani, buruh, pedagang dan swasta.

2) Suku Dayak

Masyarakat suku Dayak pada umumnya berdiam di kampung- kampung pedalaman, sedangkan yang usia sekolah bertempat tinggal secara kost / kontrak rumah secara bersama- sama / ikut menjadi anak angkat, mata pencahariannya pada umumnya petani, berkebun, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI / Polri.

3) Suku Madura

Masyarakat suku Madura pada umumnya di kota dan pelosok, mata pencahariannya adalah menarik becak, sopir, penambang perahu, Makelar, tani, berkebun dan berternak.

4) Tionghua

Masyarakat Tionghua Pada Umumnya hidup berkelompok didaerah pertokoan, berdiam di sepanjang Jalan Raya, Tepian sungai Kapuas,dan didaerah – daerah perdagangan / Pasar, adapun mata Pencahariannya pada umumnya pedagang, pengusaha, Nelayan,Berternak, dan Berkebun.

5) Suku Pendatang

Masyarakat suku Pendatang yang terdiri dari berbagai suku pribumi tersebar diseluruh penjuru Kota Pontianak, pada umumnya matapencahariannya pada….. Sipil Negara (ASN), TNI, Polri,Swasta, Buruh, Pedagang dan lain – lain.

d) Karakteristik Penduduk

Selain jumlah penduduk yang cukup besar dan padat, Masyarakat di wilayah hukum Polresta Pontianak juga terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, adat istiadat, dan agama. Hal ini menjadi salah satu sumber potensi konflik di masyarakat yang disebabkan oleh rasa sukuisme yang berlebihan, menganggap suku/agamanya lebih baik dari suku/agama yang lain serta adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Permasalahan yang menyangkut SARA yang pernah terjadi di Wilayah Hukum Polresta Pontianak sebagian besar dipicu oleh permasalahan sepele seperti saling ejek di media sosial, terlaluberlebihan dalam membanggakan tokoh/suku/kelompoknya dan permasalahan pribadi antar individu yang berbeda suku/ras/agama.

8. Sumber Daya Alam

a) Pertanian/Tanaman Pangan

Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Kota Pontianak adalah seluas 198,4 Ha yang sebagian besar berada di kec. Pontianak Barat (100 Ha) dan Kec. Pontianak Utara (63,2 Ha).

Kecamatan	Luas Panen (ha)
Pontianak Selatan	-
Pontianak Tenggara	13,9

Pontianak Timur	11,8
Pontianak Barat	100,7
Pontianak Kota	8,8
Pontianak Utara	63,2
Kota Pontianak	**198,4**

(sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2023)

b) Tanaman Holtikultura

Untuk tanaman sayur- sayuran, tanaman Kangkung dan Bayam merupakan komoditi yang dominan di Kota Pontianak, dimana produksi masing-masing tanaman tersebut adalah sebesar 21,044 kuintal dan 10,702 kuintal. Kecamatan Pontianak Utara merupakan kecamatan penghasil sayuran terbesar di Kota Pontianak. Tanaman Lidah Buaya dan Kunyit menjadi komoditi tanaman biofarmaka yang dominan dengan produksi masing-masing sebesar 872.546 kg dan 39.335 kg.
(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023)

c) Perikanan dan peternakan

Produksi ikan hasil tangkapan di Kota Pontianak ikan Tenggiri yang paling banyak di hasilkan yaitu sebesar 79,77 Ton, lalu 38,58 Ton untuk hasil tangkapan ikan Tongkol serta 25,81 Ton untuk hasil tangkapan ikan Kuwe/Manyok. Ini adalah produksi dari hasil tangkap ikan laut dan air tawar.

Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak mencatat bahwa populasi sapi potong mencapai 2.392 ekor, kambing 1.825 ekor, dan babi 1.540 ekor. Untuk ternak unggas, ayam pedaging merupakan populasi yang terbesar dibandingkan dengan unggas lainnya, yaitu mencapai 4.440.959 ekor, sedangkan ayam kampung dan itik masing-masing sebanyak 18.313 ekor dan 6.597 ekor.

(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023)

d) Kehutanan

Wilayah Kota Pontianak sebagian besarnya merupakan daerah pemukiman penduduk dan pertanian/perkebunan kecil, sehingga komoditas di sektor kehutanan kurang menonjol.

e) Perindustrian

menonjol…..

Jumlah perusahaan industri besar sedang di Kota Pontianak yaitu sebanyak 35 perusahaan dengan rincian 22 perusahaan terletak di Kec. Pontianak Utara, 4 perusahaan di Kec. Pontianak Selatan dan Kec. Pontianak Kota, 3 Perusahaan di kec. Pontianak Timur, dan 2 Perusahaan di Kec. Pontianak Barat. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri besar sedang tersebut yaitu sekitar 2.588 orang.

(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2022)

f) Perhubungan

(1) Perhubungan Darat

a. Panjang jalan yang ada Wilayah Hukum Polresta Pontianakadalah

(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023):

Jalan Aspal	:	217,71	Km
Jalan Kerikil	:	8,34	Km
Jalan Tanah	:	3,40	Km
Beton	:	56,63	Km
Jumlah	**:**	**286.08**	**Km**

b. Angkutan Umum yang tersedia diwilayah hukum PolrestaPontianak adalah sebagai berikut :

a. Becak.
b. Ojek Sepeda Motor dan Mobil Online
c. Angkutan Perkotaan
d. Bis Umum

e. Taxi

c. Jalan - jalan rawan Kecelakaan Lalu lintas dan kemacetan lalu lintas diwilayah hukum Polresta Pontianak antara lain sebagai berikut:

Sebagai berikut:…..

1) Jalan Adi Sucipto
2) Jalan A. Yani
3) Jalan Gajah Mada
4) Jalan Imam Bonjol
5) Jalan Khatulistiwa
6) Jalan Komyos sudarso
7) Jalan St. Abdurachman
8) Jalan Perintis Kemerdekaan
9) Jalan Gst.Situt mahmud
10) Jalan Tanjungpura
11) Jalan Sultan Hamid
12) Jalan Prof. M. Yamin
13) Jalan Sungai Raya Dalam
14) Jalan Pahlawan
15) Jalan H. Rais A. Rahman
16) Jalan Gusti Hamzah
17) Jalan Putri Chandramidi

(2) Perhubungan Laut/Sungai

Kota Pontianak apabila ditinjau dari segi geografis Provinsi Kalimantan Barat selain merupakan Ibu Kota Provinsi, juga mempunyai kedudukan sebagai kota pelabuhan dengan adanya Pelabuhan Indonesia II yang memberikan Fasilitas angkutan laut antar Pulau, maupun

antar Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat serta memberkan Fasilitas untuk Ekspor dan Impor dari Kalimantan Barat.

a) Sarana sungai

Sungai – sungai diwilayah h

a) Sarana sungai…..

yang masih dijadikan jalur transportasi adalah :

(1) Sungai Kapuas
(2) Anak Sungai Kapuas
(3) Sungai Landak

b) Alat Transportasi laut & Sungai yang terdapat di Kota Pontianakadalah:

(1) Perahu Dayung / sampan
(2) Perahu Motor / Speed Boat
(3) Tongkang
(4) Kapal Penyebrangan / Ferry
(5) Kapal Express yang melayani antar kota dalam provinsi.
(6) Kapal Pelni yang melayani antar pulau / Prov.

(3) Pelayaran

Wilayah hukum Polresta Pontianak terdapat sungai Kapuas dan Sungai Landak yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran orang dan barang yang melayani rute lokal maupun Internasional. Sarana dan prasarana pelayaran di wilayah hukum Polresta Pontianak meliputi pelabuhan penumpang, pelabuhan bongkar muat barang dan pelabuhan rakyat yang didukung oleh berbagai macam perusahaan pelayaran penumpang maupun barang/ekspedisi. Jumlah barang yang dibongkar dan dimuat di Pelabuhan Dwikora Kota Pontianak yaitu jumlah

barang yang dibongkar 1.123.670 Ton dan jumlah barang yang dimuat yaitu 480.338 Ton. Sedangkan banyaknya penumpang kapal di pelabuhan Dwikora Pontianak yaitu penumpang datang 52.638 orang dan penumpang berangkat 40.515 orang.

(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023)

(4) Perhubungan Udara

orang…..

Tidak terdapat Fasilitas lapangan terbang diwilayah hukumPolresta Pontianak.

g) Komunikasi

Masuknya berbagai macam operator seluler di wilayah hukum Polresta Pontianak menyebabkan persaingan antar operator seluler untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasaranatelekomunikasi. Hal tersebut berdampak pada seluruh wilayah di KotaPontianak sudah terjangkau sinyal operator seluler dan akses internetbroadband.

h) Listrik

1. Sumber Daya listrik yang dioperasionalkan di Kota Pontianak dandisekitarnya adalah jenis Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Berikut adalah 2 (dua) pembangkit listrik yang ada di Wilayah hukum Polresta Pontianak :

   a. PLTD berlokasi di Jl. Khatulistiwa Pontianak.
   b. PLTG Siantan berlokasi di Jl. Khatulistiwa Pontianak.

2. Data Distribusi listrik PLN di wilayah Kota Pontianak adalah sebagai berikut : *(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023)*

i) Air Bersih

Sumber air bersih di wilayah Hukum Polresta Pontianak berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak. Perkembangan jumlah pelanggan air PDAM meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan makin bertambahnya perumahan dan pemukiman penduduk di wilayah hukum Polresta Pontianak. Hambatan penyediaan air bersih di wilayah hukum Polresta Pontianak yaitu apabila memasuki

Polresta.....

musim kemarau maka kuantitas semakin menurun dan kualitas air menjadi payau/asin. Hal tersebut dikarenakan PDAM belum memiliki alat pengolahan air yang memadai. Jumlah air yang disalurkan oleh PDAM Kota Pontianak yaitu 38.962.758 M^3. *(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023)*

9. Ideologi

a) Airan Sempalan

Berdasarkan Hasil Rakernas MUI tanggal 6 November 2007, ada 10 Kriteria aliran sesat. Satu aliran dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu unsur dari 10 (sepuluh) kriteria berikut:

1) Mengingkari rukun iman dan Rukun Islam.
2) Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Dalil syar'i (Al-Qur'an dan As-sunah).
3) Meyakini Turunnya Wahyu setelah Al-Qur'an.
4) Mengingkari Otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an.
5) Melakukan Penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidahTafsir.
6) Mengingkari Kedudukan Hadist nabi sebagai Sumber ajaran Islam.
7) Melecehkan dan atau Merendahkan Para Nabi dan Rasul.
8) Mengingkari Muhamad SAW sebagai Nabi dan Rasul Terakhir.

9) Mengubah Pokok – Pokok ibadah yang telah ditetapkan Syariah. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa Dalil Syar'

b) Agama

1) Jumlah pemeluk agama di wilayah hukum Polresta Pontianakadalah sebagai berikut.:

Islam	:	521.872	orang
Kristen	:	32.800	orang
Khatolik	:	40.234	orang
Hindu	:	316	orang
Budha	:	77.709	o
Konghuchu	:	3.159	orang
Kepercayaan	:	6	orang

b)agama…..

Sumber : Disdukcapil Kota Pontianak

2) Sarana tempat ibadah di wilayah hukum Polresta Pontianak adalahsebagai berikut:

Kecamatan *Subdistrict*	Masjid *Mosque*	Mushola *Pray Room*	Gereja Protestan *Protestant Church*	Gereja Katholik *Catholic Church*	Pura *Temple*	Vihara	Kapel Katolik	Klenteng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pontianak Selatan	51	57	29	2	0	21	26	4
Pontianak Tenggara	42	58	9	1	0	2	2	0
Pontianak Timur	50	74	10	1	0	3	8	0
Pontianak Barat	63	88	9	1	0	2	9	0
Pontianak Kota	74	81	12	2	0	12	18	0
Pontianak Utara	66	81	39	2	0	14	10	12
Kota Pontianak	**346**	**439**	**108**	**9**	**0**	**54**	**73**	**16**

(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023)

c) Komunisme

Selama Tahun 2023 di wilayah hukum Polresta Pontianak belum ditemukan adanya kasus terkait komunisme maupun temuan adanya masyarakat yang menggunakan simbol-simbol Komunisme.

d) Agama

1. Jumlah pemeluk agama di wilayah hukum Polresta Pontianakadalah

sebagai berikut:

Islam	:	521.872	orang
Kristen	:	32.800	orang
Khatolik	:	40.234	orang
Hindu	:	316	orang
Budha	:	77.709	orang
Konghuchu	:	3.159	orang
Kepercayaan	:	6	orang

Sumber : Disdukcapil Kota Pontianak

2. Sarana tempat ibadah di wilayah hul[illegible] adalah sebagai berikut:

d) Agama…..

Kecamatan *Subdistrict*	Masjid *Mosque*	Mushola *Pray Room*	Gereja Protestan *Protestant Church*	Gereja Katholik *Catholic Church*	Pura *Temple*	Vihara	Kapel Katolik	Klenteng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pontianak Selatan	51	57	29	2	0	21	26	4
Pontianak Tenggara	42	58	9	1	0	2	2	0
Pontianak Timur	50	74	10	1	0	3	8	0
Pontianak Barat	63	88	9	1	0	2	9	0
Pontianak Kota	74	81	12	2	0	12	18	0
Pontianak Utara	66	81	39	2	0	14	10	12
Kota Pontianak	**346**	**439**	**108**	**9**	**0**	**54**	**73**	**16**

pontianakkota.bps.go.id

e) Politik

1. Administrasi Pemerintah

DATA PEJABAT PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022			
NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	ALAMAT
1.	Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM.,MT	WALIKOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
2.	Bahasan, SH	WAKIL WALIKOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
3.	Dr.H.Mulyadi, M.Si	SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
4.	Iwan Amriadi AP, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

5.	Yuli Trisna Ibrahim, ST., MT.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
6.	Ir. Hidayati	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
7.	drh. Aswin Djafar	STAF AHLI BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
8.	Kusyairi, SE.,M.Si	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN SDM	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
9.	dr. Sidig Handanu Widoyono, M.Kes	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK	Jl. Zainuddin No.5 Kec. Pontianak Kota
10.	Yaya Maulidiya, SH, MH	INSPEKTUR KOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
11.	Hj.Syf. Adriana Farida, SE.,M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK	Jl. Zainuddin Kec. Pontianak Kota
12.	drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK	Jl. Zainuddin Kec. Pontianak Kota
13.	Ir. Amirullah, MA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK	Kantor Terpadu, Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan
14.	Yuni Rosdiah, S.I.P, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PONTIANAK	Jl. Rahadi Usman No.3 Kec. Pontianak Kota
15.	SH.,M.Si Sri Sujiarti	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK	Kantor Terpadu, Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan
16.	dr. Saptiko, M.Med PH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.30 Kec. Pontianak Selatan
17.	Rendrayani, S.STP, M.Si	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK	Jl. Alianyang No.7, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota
18.	Ir. Haryadi S. Triwibowo	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK	Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan
19.	Rizal, S.Sos	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK	Jl. Letnan Jendral Sutoyo No.17 Kec. Pontianak Selatan
20.	Dra. Utin Sri Lena C, M.Si	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK	Jl. Alianyang No.7, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota
21.	drg. Trisnawati, MM	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK	Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1B Kec. Pontianak Selatan
22.	Tinorma Butar Butar, SH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK	Jl. Muhammad Sood No.1 Kec. Pontianak Selatan
23.	Drs. Zulkarnain, M.Si	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK	Jl. Zainuddin No.36 Kec. Pontianak Kota

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

24.	Erma Suryani, S.Sos., M.Si	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK	Kantor Terpadu, Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan
25.	Junaidi, S.IP, M.Si	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK	Jl. Alianyang No.7, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota
26.	Ir. Firayanta, MT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.252, Kec. Pontianak Tenggara
27.	Ir. Sy. Usmulyono, MT	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK	Jl. Alianyang No.7B Kec. Pontianak Kota
28.	Derry Gunawan, ST, MT, M.Sc	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK	Kantor Terpadu, Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan
29.	Titin Subakti, S.Sos., M.Si.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Jl. Sultan Abdurrahman Kec. Pontianak Kota
30.	H. M. Bintoro, SE.,MM	KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK	Jl. Budi Utomo No.29 Kec. Pontianak Utara
31.	Ahmad Hasyim, ST	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA SOSIAL DAN POLITIK KOTA PONTIANAK	Jl. Sutoyo Komp. Sutoyo Indah Kec. Pontianak Selatan
32.	Ibrahim, S.IP., M.Si	CAMAT PONTIANAK BARAT	Jl. Tabrani Ahmad, Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat
33.	Martagus, SE	CAMAT PONTIANAK SELATAN	Gg. Mentari, Kota Baru, Kec. Pontianak Selatan
34.	Drs. Ahmad Sudiyantoro	CAMAT PONTIANAK KOTA	Jl. Alianyang No.10D, Kec. Pontianak Kota
35.	Dini Eka Wahyuni, S.STP.,MT	CAMAT PONTIANAK UTARA	Jl. Khatulistiwa No. 2 Kec. Pontianak Utara
36	M. Akif	CAMAT PONTIANAK UTARA	Jl. H. Rasuna Said Kec. Pontianak Timur

2. Alamat Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kota Pontianak

NO	NAMA PARPOL	PENGURUS PORPOL			ALAMAT PARPOL
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

1.	**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**	**HUDDIN, S.E**	**SYAIFUL MUKADAS, S.PD.I**	**SAMHADI, S.AG**	**Jl. Suprapto V Nomor 51 Rt: 004 Rw: 034 Pontianak Selatan**
2.	**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**	**H. NAUFAL BA'BUD, SP.,M.Sos**	**SUGENG RAHARJO, A.Md**	**AKBAR RIYANTO**	**Jl. Reformasi No. 7 Pontianak Tenggara**
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	SATARUDIN, SH	EMILIANA, T.B.,SH.,M.Si	NELLA LENNY HERIYANI, SH.,MH.,M.Kn	Jl. Parit Demang dalam No. 15 Pontianak Selatan

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

4.	PARTAI GOLKAR	HJ. BEBBY NAILUFA, SE.,M.Sos	KARYADI MUSTAFA	DEDET GUNAWAN, SE	Jl. Sutoyo Pontianak Selatan
5.	PARTAI NasDem	DR. FIRDAUS ZAR'IN, S.PD.,M.SI	SHARUL EFENDI	ANDI IIS MARYANTI	Jl. Paris II No. 5 Pontianak Tenggara
6.	PARTAI BURUH	URAY RAMLI	YULIANA ASTUTI	MURYANI	Jl. Jeranding No. 71 A Kelurahan Sui. Jawi Dalam Pontianak Barat

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

7.	PARTAI GELORA	TOMMY TRI HANDOKO S.H	SAHBANDI, SE	MERI HAMID S.Pd.I	Jl. Banjar Serasan Pontianak Timur
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	HUSIN	M. THAUFANI	SRI RAHAYU	Jl. Wonobaru Gg. Wonodadi 1 Pontianak Selatan
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	YUSNI, SE.,M.Si	ASMAWATI	DEWO PURWANI	Jl. Komyos Sudarso, GG. Kuini 1 Pontianak Barat

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAMRI, SH., MH	FERRY HARIADI, SH.,MH	HASANI, SE.,SH.,MH	Jl. Husein Hamzah Komp. Mitra Mas 1 No. 03-04 Pal V Pontianak Barat
11.	PARTAI GARUDA	ROHIMAH S HANAFIE	IKSANDI	MAYA MIRANDA	Jl. Tabrani Ahmad Gg. Setara Pontianak Barat
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ALWY ALMUTHAHAR	REYMOND RIKANOVA	YULIA MARIATI	Jl. HM. Suwignyo Pontianak Kota

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

13.	PARTAI BULAN BINTANG	AAN FEBRIAN	CHAIRUL CHANDRA	WULANDARI	Jl. Karet No 73 RT005/RW028 kec. Pontianak Barat
14.	PARTAI DEMOKRAT	TAN LIE HIAN	AGUS MURYANTO	LAMBERTUS ARIESTIO YUDISTIRA	Jl. Purnama Komp. Pinangsia Blok B Pontianak Selatan
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	KRISTIAN WAHYU SUTRISNO	FEDERICO THIMOLTIUS TAN	Dra. MARIA KULAM	Jl. Atot Ahmad No. 25 Pontianak Barat

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

16.	PARTAI PERINDO	JOKO SUSANTO, S.Kom.,M.Sos	FANDY CENDRAWIRA	LENDA MARIANI	Jl. Ya'm Sabran No.83 B, Rt.002 RW.002
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	H. WIDODO, SE., MM	Drs. SUBANDI DOLET	H. HANAFI H. HADADEK	Jl. Komyos Sudarso Ruko Pergudangan Gg. Pisang Pontianak Barat
18.	PARTAI UMMAT	MULYADI, SE	MARIANI, S.Hut	DWI ISWANTO	Jl. Tabrani Ahmad komplek Palem Indah B 5 Kelurahan Pal lima Kec. Pontianak Barat

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

3. Data Perolehan Kursi Partai Politik Tahun 2019

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH KURSI	
		PROV. KALBAR	KOTA PONTIANAK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	5	3
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	7	6
3	PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA (PDIP)	15	6
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	3
5	PARTAI NASDEM	8	6
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	0	0
7	PARTAI BERKARYA	0	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	3	5
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3	4
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	5	3
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2	3
14	PARTAI DEMOKRAT	7	3
19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	0	1
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1	2
JUMLAH		**65**	**45**

Sumber : KPU (http://kalbar.kpu.go.id/berita/rekapitulasi-tungsura-kalbar-pemilu-2019)

4. Data Anggota DPRD Kota Pontianak terpolih Tahun 2019

NO	NAMA	JUMLAH SUARA	JABATAN	ALAMAT	FRAKSI
1	SATARUDIN, SH	2.873	KETUA DPRD	JL. YA' M. SABRAN GG. ANGSANA	PDI Perjuangan
2	DR. FIRDAUS ZAR'IN, S.PD.M.SI	2.632	WK. KETUA DPRD	JL. TABRANI AHMAD KOMP.GRAHA BUMI KHATULISTIWA BLOK.C/12A RT.004 RW.014 KEL.SEI JAWI DALAM KEC. PONTIANAK BARAT	Nasdem
3	H. NAUFAL BA'BUD, S.P.,M.Sos	3.257	WK. KETUA DPRD	JL. HUSEIN HAMZAH NO. 131	Gerindra
4	MUHAMMAD ARIF, S.Ag	2.172	WK. KETUA DPRD	JL. TANJUNG RAYA I JL. ISMITA	PKS
5	NELLA LENNY HERIYANI, SH.,MH.,M.Kn	4.241	ANGGOTA	JL. SUI. RAYA DALAM KOMP. DISBUN 2 C 37	PDI Perjuangan
6	NUR FADLI, SH	1.873	ANGGOTA	JL. KOM YOS SUDARSO GG. SAPTA MARGA JALUR 2 RT. 002 RW. 034	PDI Perjuangan
7	EMILIANA TB, SH., M.Si	4.553	ANGGOTA	JL. PRT. PANGERAN GG. PATI 3 BLOK K/04	PDI Perjuangan

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

8	HUI KIANG, SH	2.721	ANGGOTA	JL. GST. SULUNG LELANANG GG. DAMAI 2 NO. 73	PDI Perjuangan
9	CANDRA JAYA PARDIANSYAH, SE, M.SOS	2.616	ANGGOTA	JL. SEPAKAT 1 (A.YANI) BLOK G.NO.8 KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK	PDI Perjuangan
10	RINO PANDRIYA, SH	3.161	ANGGOTA	JL. HUSEIN HAMZAH KOMP. DWIRATNA INDAH 3 NO.24 D	Amanat Keadilan Bangsa
11	ALPIAN AMINARDI,SH.,MH	2.395	ANGGOTA	JL.PARIT PANGERAN GG.MAWAR	Amanat Keadilan Bangsa
12	SYAIFUL MUKADAS, S. PD. I	3.478	ANGGOTA	JL. TANJUNG RAYA 1 GG. USAHA BERSAMA NO. 25 RT 002/005 DALAM BUGIS PONTIANAK TIMUR	Amanat Keadilan Bangsa
13	ZULFYDAR ZAIDAR MOCHTAR SE, MM	1.921	ANGGOTA	JL KARIMUN NO 38 PONTIANAK KALBAR 78816	Amanat Keadilan Bangsa
14	MUJIONO, S.Pd.,S.Mn.,M.AK	2.218	ANGGOTA	JLN. TABRANI AHMAD GG. REFORMASI NO. 47	Amanat Keadilan Bangsa
15	LUTFI ALMUTAHAR, S.Ip.,M.Sos	2.094	ANGGOTA	JL. TANJUNG RAYA I GG. KADRIAH NO. 7	Amanat Keadilan Bangsa
16	ARDIAN	2.690	ANGGOTA	JLN. HOS COKRO AMINOTO	Amanat Keadilan Bangsa

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

17	HARDIANTO, S.T	1.410	ANGGOTA	JL. KARNA SOSIAL NO. 19	Amanat Keadilan Bangsa
18	AKBAR RIYANTO	2.455	ANGGOTA	JL. DR. SUTOMO NO. 24	Gerindra
19	SUHARDI, S.Pd	1.917	ANGGOTA		Gerindra
20	YOGGY PERDANA PUTRA	2.246	ANGGOTA	JL. KHATULISTIWA GG. USAHA BERSAMA 1	Gerindra
21	BUNYAMIN, S.Pd	1.213	ANGGOTA	JL. TANJUNG HARAPAN GG. SUTERA	Gerindra
22	AHMAD SARBAINI, S.Sos	1.583	ANGGOTA	JL. PROF. M. YAMIN NO. 4	Gerindra
23	HUSIN, SP	1.676	ANGGOTA	JL. DANAU SENTARUM GG. H. NGADIO	PKS
24	H. USMAN ROLIBI, S.Pd.I (MENINGGAL DUNIA TGL. 30 SEPT. 2022) PAW OLEH ALI FURRAHMAN	1.590	ANGGOTA	JL. KOMYOS SUDARSO GG. SUKAMAJU DALAM	PKS
25	SITI RUKASIH	2.640	ANGGOTA	JL. 28 OKTOBER	PKS

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

26	SUHARMANTO, SE	955	ANGGOTA	JL. PERDANA GG. ISLAH NO. 1	PKS
27	M. YULI ARMANSYAH	1.777	ANGGOTA	JL UJUNG PANDANG GANG HANURA RT 01 RW 37 KEL SUI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA	Nasdem
28	SHARUL EFENDI, SH	4.429	ANGGOTA	JL. GST. SITUT MAHMUD	Nasdem
29	RACHMAT	2.262	ANGGOTA	JL. KHATULISTIWA NO 176	Nasdem
30	AGUS SUGIANTO	3.019	ANGGOTA	JL. TANJUNG PULAU	Nasdem
31	HERY KURDI	3.232	ANGGOTA	JL. KARYA BARU KOMP. PURNAMA PALMA	Nasdem
32	BEBBY NAILUFA, SE.,M.Sos	3.075	ANGGOTA	JL. PUTRI CANDRAMIDI GG. SUKADAMAI NO. 21	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
33	MARDIANA, SH	2.092	ANGGOTA	JL. 28 OKTOBER NO. 25	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
34	MANSYUR AR. SAG. M. SOS	2.605	ANGGOTA	JL. S. MARGONO GG. TVRI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	Hanura dan Karya Bintang Demokrat

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

35	ANWAR ALI, SH.,M.Sos	1.399	ANGGOTA	JL. HM. SUWIGNYO NO 28	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
36	TAN LIE HIAN, S.H	2.717	ANGGOTA	JL. KHATULISTIWA NO. 103	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
37	ARIADI, S.E	758	ANGGOTA	JL. TANJUNG PURA GG. KEDAH NO. 35/98	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
38	M MUSTA'AN	2.059	ANGGOTA	JLN .KOMYOS SUDARSO	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
39	DAMRI, S.H.,M.H	2.346	ANGGOTA	JLN. HUSIEN HAMZAH KOMP. MITRA MAS 1 NO. 3	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
40	DIAN EKA MUCHAIRI,S.H., M.M	5.428	ANGGOTA	JL. HUSEIN HAMZAH KOMP. PALESTIN INDAH PERMAI 2 C NO. 21	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
41	YANDI	1.819	ANGGOTA	JL. KARYA BARU KOMP. PONDOK PELANGI BLOK A1 NO. 4	Hanura dan Karya Bintang Demokrat
42	ERWIN SUGIARTO, S.H., M.Kn	1.462	ANGGOTA	JLN. DR WAHIDIN S. KOMP. BATARA INDAH I BLOK M. NO 1	PPP
43	H. WIDODO	1.930	ANGGOTA	JL. YA'M SABRAN NO. C 2 A	PPP

44	H. MUKTI A. RAHMAN, S.H	1.782	ANGGOTA	JL GUSTI SITUT MAHMUD GANG GENERASI I NO. A1	PPP
45	SUBANDI	1.984	ANGGOTA	JL. KOTA LAYA	PPP

5. Data Anggota DPRD Prov.Kalbar terpilih Tahun 2019

NO	NAMA PARPOL	DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALBAR/NAMA ANNGOTA DPRD TERPILIH							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	ROBY NAZARUDIN, SH	H. IRSAN, S.AG, MH	ALEKSANDER, S.AG	DR. HJ. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.PH	-	-	MUHAMMAD RIZKA WAHAB	MUHAMMAD THOHIR, S.AG
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	H. ISHAK ALI AL MUTHAHAR, S.SOS, M.SI	YULIANA, A.MD	-	IR. H. SURIANSYAH, MMA	-	COK HENDRI RAMAPON, S.SOS	GREGORIUS HERKULANUS BALA	HERONIMUS
3	PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA (PDIP)	PAULUS ANDY NURSALIM, SE.MM	1. MEISKE ANGGRAINY, S.SOS. MM 2. BAMBANG GANEFO PUTRA, SE	1. SEBASTIANUS DARWIS, S.AG 2. ELIAS AJAN	DARSO	1. MINSEN, SH 2. TAPANUS, SH. MH 3. ANGELINE FREMALCO, SH 4. RAMLI RAMA	1. MARTINUS SUDARNO, SH 2. MUSA, SE	1. M. KEBING 2. YOHANES RUMPAK, S.PD. MM	THOMAS ALEKSANDER, S.SOS, M.SI
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	ZULKARNAEN SIREGAR, SH (PAW) HERI MUSTAMIN, SH	1. ERRY IRIANSYAH, ST 2. ARIEF RINALDI, ST	DR. H. EDY R. YACOUB, M.SI	IR. H. PRABASA ANANTATUR, MH		FRANSISKUS ASON, SP	H. USMANDY	HJ. SUMA JENNY HERYANTI, SH. MH
5	PARTAI NASDEM	MICHAEL YAN SRI WIDODO, SE. MM	SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.MD	SUDIANTONO	H. SUBHAN NUR	SUMADI	FRANSISKUS SUWONDO, SE	TERRY IBRAHIM, S.SOS. MM	KHO SUSANTI, S. PD
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PARTAI BERKARYA	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	H. ARIF JONI P. ST.MT	H. FATAHILLAH ABRAR, S.AG, M.SI	-	SABIRIN, SP	-	-	-	-
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	-	-	-	-	-	-	YULIANUS ASRONI, SE	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	H. MAD NAWIR	-	-	-	-	-	DRS. BUDI BASADI	H. MIFTAH, S.HI
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	DR. ARDIYANSYAH, SH. MH	-	-	TONY KURNIADI, ST. MSI	-	MUHAMMAD, S.SOS	RITAUDIN, SE	YULIANI
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	-	SUIB, SE	-	-	-	-	SUYANTO TANJUNG, S.SOS, M.SI	-
14	PARTAI DEMOKRAT	-	1. DRS. AFFANDIE. AR 2. ERMIN ELVIANI, SH	NENENG, M. SOS	MUHAMMAD ISYA, SH	-	ARON, SH	SIMON PETRUS	MASDAR, S. PD. SD. M.SI PAW KEPADA H. RASMIDI, SE. MM
19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	-	-	-	-	-	-	-	-

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	-	-	-	-	-	MARTEN LUTER, S.SOS	-	-
Sumber : KPU PROV. KALBAR (https://kalbar.kpu.go.id/berita/pengumuman-daftar-calon-terpilih-dprd-kalbar-2019)									

6. Data Anggota DPR RI Dapil Terpilih Tahun 2019

NO	NAMA PARPOL	DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALBAR/NAMA ANNGOTA DPRD TERPILIH	
		1	2
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	DANIEL JOHAN	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	KATHERINE A. OE	
3	PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA (PDIP)	1. DRS. CORNELIS, MH 2. MARIA LESTARI, S.PD	1. LASARUS, S.SOS, M.SI 2. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP, M.SI
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	MAMAN ABDURRAHMAN, ST	DR. DRS. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.SI
5	PARTAI NASDEM	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH. MH	YESSY MELANIA, SE
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)		
7	PARTAI BERKARYA		
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	H. ALIFUDIN, SE. MM	
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)		
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)		
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	H. BOYMAN HARUN, SH	
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)		
14	PARTAI DEMOKRAT		

19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)		
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)		
Sumber : KPU RI (*https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2019/1099 & https://drive.google.com/file/d/1-d5cNU08Y11wV_bHSJDKEk0ZLDVMS-8e/view*)			

7. Anggota Dewan Perwakilan daerah Terpilih Prov.Kalbar Tahun 2019

NO	NAMA	JUMLAH SUARA
1	Drs. CHRISTIANDY SANJAYA. SE. MM	406304
2	MARIA GORETI, S.Sos, M. Si	287341
3	ERLINAWATI, SH. MAP	259058
4	H. SUKIRYANTO	220937
Sumber KPU Prov. Kalbar (http://kalbar.kpu.go.id/berita/rekapitulasi-tungsura-kalbar-pemilu-2019)		

8. Hasil rekapitulasi Pilpres Tahun 2019

Dari hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WILAYAH KOTA PONTIANAK	JUMLAH
1.	Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN		umum…..
2.	H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	237301	455601
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
A	Jumlah Seluruh Suara Sah	370785	710547
B	Jumlah Suara Tidak Sah	4371	11781
C	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	375156	722328
Sumber KPU Prov. Kalbar (http://kalbar.kpu.go.id/berita/rekapitulasi-tungsura-kalbar-pemilu-2019)			

9. Pemilu Kepala daerah.

Pemilihan kepala Daerah Serentak Tahun 2018 merupakan salah satu pembaharuan dalam sistem pemilihan Demokrasi di Indonesia, dimana pertama kali dilakukan secara langsung berdasarkan pemungutan suara memilih calon Gubernur. Data Perolehan suara sebagai berikut:

10. Pemilu Kepala daerah Kota Pontianak 2018

NO	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASLON	BARAT	KOTA	SELATAN	TENGGARA	TIMUR	UTARA	JUMLAH
1	HARRY ARDYANTO & YANDI	7.946	9.805	14.869	4.193	3.831	13.650	54.294
2	Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT & BAHASAN, SH	51.007	44.321	24.240	16.578	30.919	33.775	200.840
3	SATARUDIN, SH & ALPIAN AMINARDI, SH, MH	13.297	8.089	4.563	3.080	14.131	15.904	59.064
	JUMLAH SUARA SAH	72.250	62.215	43.672	23.851	48.881	63.329	314.198

	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.755	1.287	1.007	445	1.304	2.105	7.903
	JUMLAH SUARA SAH & TIDAK SAH	74.005	63.502	44.679	24.296	50.185	65.434	322.101

f) Ekonomi

1. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Pontianak pada Juli 2023 terjadi inflasi sebesar 0,10 persen atau terjadi kenaikan Indeks HargaKonsumen (IHK) dari 115,84 pada Juni 2023 menjadi 115,96 pada Juli 2023. Tingkat inflasi tahun kalender Juli 2023 sebesar 1,52 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2023 terhadap Juli 2022) sebesar 4,32 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikanharga pada Juli 2023 adalah: tarif angkutan udara, daging ayam ras, ikan tongkol, tarif bioskop, wortel, telur ayam ras, obat dengan resep, udang basah, susu bubuk, dan kentang.Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada Juli 2023 adalah: sawi hijau, ketimun, minyak goreng, kacang panjang, cabai rawit, bayam, kangkung, daging babi, buncis, dan labu air

(*sumber :* https://pontianakkota.bps.go.id/pressrelease/2023/08/01/886/perkembangan-indeks-harga-konsumen--inflasi-kota-pontianak-juli-2023.html*)*

Indeks Harga Konsumen IHK dan Tingkat Inflasi Kota Pontianak Bulan November 2022, Tahun Kalender 2022 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018 = 100)							
Kelompok Pengeluaran	**IHK Nov 2021**	**IHK Desember2021**	**IHK Nov 2022**	**Tingkat Inflasi Nov 2022 1) (%)**	**Tingkat Inflasi Tahun Kalender2022 2) (%)**	**Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 3) (%)**	**Andil Inflasi Nov 2022 (%)**
Umum (Headline)	**107,06**	**107,40**	**113,57**	**0,34**	**5,74**	**6,08**	**0,3400**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,56	111,33	116,35	0,90	4,51	5,24	0,2827
Pakaian dan Alas Kaki	104,70	104,70	104,89	0,03	0,18	0,18	0,0015
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,51	102,58	108,35	0,00	5,62	5,70	0,0000

Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,30	107,36	114,37	0,08	6,53	6,59	0,0041
Kesehatan	122,66	122,31	120,95	0,01	-1,11	-1,39	0,0003
Transportasi	103,45	104,10	122,23	-0,02	17,42	18,15	-0,0028
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,81	99,79	99,68	0,00	-0,11	-0,13	0,0000
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104,64	105,14	107,92	0,05	2,64	3,13	0,0009
Pendidikan	106,18	106,18	107,41	0,00	1,16	1,16	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	108,55	108,55	112,38	0,26	3,53	3,53	0,0210
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110,98	111,10	120,46	0,64	8,42	8,54	0,0379

2. Perkembangan upah minimum Kota Pontianak

UMP/UMK 2021	UMP/UMK 2022	UMP/UMK 2023
Rp. 2.416.000	Rp. 2.579.616	Rp. 2.750.644

3. Kenaikan harga BBM pada tahun 2022 sangat berdampak pada berbagai aspek perekonomian. Terjadi berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada tingkat ekonomi masyarakatKota pontianak secara umum.

4. Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sangat memungkinkan masuknya barang-barang illegal asal Malaysia berupa makanan, minuman, pakaian dan kendaraan serta wilayah Kalbar berpotensi digunakan sebagai lokasi transit perdagangan manusia. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) diwilayah Kota Pontianak belum dapat dirasakan oleh Pegusaha, hal tersebut masih banyaknya peredaran produk – produk barang / jasa yang masuk di wilayah Kalbar secara ilegal (barang bajakan). Masuknya barang – barang ilegal

tersebut bila tidak ditangani secara terpadu maka akan merugikan perekonomian Indonesia, khususnya Kota Pontianak.

5. Perkembangan Harga Rata-Rata Kebutuhan Pokok diwilayah hukumPolresta Pontianak adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KOMODITI	SATUAN	HARGA	KET
	BERAS			
1.	Beras IR 42	Kg	Rp. 13.500,-	
	Beras Siam	Kg	Rp. 13.000,-	
	Beras Bulog (Op)	Kg	Rp. 10.363,-	
	Beras Kampung	Kg	Rp. 10.600,-	
2.	Gula pasir	Kg	Rp. 13.600,-	
3.	**MINYAK GORENG**			
	Kemasan Botol	1/lt	Rp. 22.000,-	
	Curah	Kg	Rp. 13.700,-	
4.	**TEPUNGTERIGU**			
	Segi Tiga Biru	Kg	Rp. 12.000,-	
	Cakra Kembar	Kg	Rp. 8.100,-	
	Kunci	Kg	Rp. 8.000,-	
5.	**DAGING**			
	Daging Murni	Kg	Rp. 125.000,-	
	Ayam Broiler	Kg	Rp. 40.000,-	
	Ayam Kampung	Kg	Rp. 58.750,-	
6.	**TELUR**			
	Ayam Broiler	Kg	Rp. 23.000,-	
	Ayam Kampung	Kg	Rp. 56.250,-	
7.	**CABE MERAH**			
	Keriting	Kg	Rp. 73.600,-	
	Biasa	Kg	Rp. 40.500,-	
	CABE RAWIT			
8.	Rawit Hijau	Kg	Rp. 80.000,-	
	Rawit Merah	Kg	Rp. 25.750,-	
9.	**BAWANG**			
	Bawang Merah	Kg	Rp. 31.800,-	
	Bawang Putih	Kg	Rp. 22.800,-	
10.	**SUSU KENTAL MANIS**			
	Merk Bendera	Klg	Rp. 10.000,-	
	Merk Indomilk	Ktk	Rp. 37.800,-	
11.	**SUSU BUBUK**			
	Indomilk 400Gr	Bks	Rp. 37.800,-	

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

	Dancow 400Gr	Bks	Rp. 40.000,-	
12.	**GARAM BERYODIUM**			
	Bata (250g)	-	-	
	Halus	Kg	Rp. 2.100,-	
13.	**KACANG KEDELAI**			
	Eks. Impor	Kg	Rp. 9.500,-	
	Lokal	Kg	-	
14.	**KACANG**			
	Kacang Tanah	Kg	Rp. 24.750,-	
	Kacang Hijau	Kg	Rp. 18.000,-	
15.	**MIE INSTAN**			
	Indomie Kari	Bks	Rp. 1.887,-	
	Indomie Kaldu	Bks	Rp. 1.950,-	
16.	**UDANG**			
	Udang Basah	Kg	Rp. 31.500,-	
	Udang Ebi	Kg	Rp.103.750,-	
17.	**IKAN**			
	Ikan Tenggiri	Kg	Rp. 75.000,-	
	Ikan Bawal	Kg	Rp. 55.000,-	
	Ikan Tongkol	Kg	Rp. 27.750,-	
18.	**IKAN ASIN**			
	Ikan Asin Teri	Kg	Rp. 78.750,-	
	Ikan Asin Gembung	Kg	Rp. 37.500,-	
	Ikan Asin Sepat	Kg	Rp. 35.750,-	
19.	**LAIN-LAIN**			
	Ketela Pohon	Kg	Rp. 3.625,-	
	Jagung Pipilan	Kg	Rp. 6.375,-	
	Kentang	Kg	Rp.15.000,-	

g) Sosial Budaya

1. Pendidikan

a. Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak ini untuk Sarana Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancer.

b. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional selalu mengalami perubahan – perubahan didalam kurikulum dan sistem Pendidikan Nasional, diantaranya adalah adanya kebijakan sistem pendidikan secara tatap muka setelah sebelumnya secara daring/online selama masa pendemi Covid 19 guna meminimalisir mewabahnya virus Covid 19.

c. Kerawanan – kerawan yang terdapat di Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak dibidang pendidikan pada saat sekarang ini adalah:

1) Meningkatnya angka siswa yang Putus sekolah (Drop Out).
2) Meningkatnya jumlah Anak jalanan yang seharusnya berstatussebagai Pelajar.
3) Banyaknya kasus – kasus akibat dari kenakalan Remaja dan Kejahatan yang dilakukan oleh anak – anak

d. Jumlah sekolah di wilayah hukum Polresta Pontianak adalah sebagai berikut:

Wilayah	TK			KB			TPA		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
Kec. Pontianak Kota	28	0	28	25	0	25	4	0	4
Kec. Pontianak Utara	15	1	14	32	0	32	0	0	0
Kec. Pontianak Selatan	24	1	23	20	0	20	3	0	3
Kec. Pontianak Barat	17	2	15	20	0	20	0	0	0
Kec. Pontianak Timur	16	1	15	24	0	24	1	0	1
Kec. Pontianak Tenggara	18	0	18	13	0	13	1	0	1
Total	**118**	**5**	**113**	**134**	**0**	**134**	**9**	**0**	**9**

Wilayah	SPS			PKBM			SKB		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
Kec. Pontianak Kota	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Kec. Pontianak Utara	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Kec. Pontianak Selatan	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Kec. Pontianak Barat	1	0	1	3	0	3	1	1	0

Kec. Pontianak Timur	2	0	2	4	0	4	0	0	0
Kec. Pontianak Tenggara	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Total	**5**	**0**	**5**	**14**	**0**	**14**	**1**	**1**	**0**

Wilayah	SD			SMP			SMA		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
Kec. Pontianak Kota	35	18	17	18	4	14	13	2	11
Kec. Pontianak Utara	38	31	7	17	7	10	11	2	9
Kec. Pontianak Selatan	28	14	14	16	7	9	12	4	8
Kec. Pontianak Barat	25	21	4	12	5	7	7	2	5
Kec. Pontianak Timur	24	21	3	8	4	4	4	2	2
Kec. Pontianak Tenggara	19	8	11	9	1	8	8	0	8
Total	**169**	**113**	**56**	**80**	**28**	**52**	**55**	**12**	**43**

Wilayah	SMK			SLB			TOTAL		
	Jml	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**	**Jml**	**N**	**S**
Kec. Pontianak Kota	4	1	3	1	0	1	131	25	106
Kec. Pontianak Utara	7	3	4	0	0	0	123	44	79
Kec. Pontianak Selatan	8	3	5	0	0	0	112	29	83
Kec. Pontianak Barat	7	2	5	1	0	1	94	33	61
Kec. Pontianak Timur	2	1	1	1	0	1	86	29	57
Kec. Pontianak Tenggara	2	0	2	2	0	2	74	9	65
Total	**30**	**10**	**20**	**5**	**0**	**5**	**620**	**169**	**451**
Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/136000									

UNIVERSITAS				
No	**Nama**	**Bentuk**	**Alamat**	**Telepon**
1	Universitas Oso	Universitas	Jalan Untung Suropati No.99	'0811-5686-060
2	STIKES Yarsi Pontianak	Sekolah Tinggi	Jalan Panglima A im Pontianak Timur	(0561) 732927
3	Sekolah Tinggi Theologia Injili Indonesia Pontianak	Sekolah Tinggi	Jl. Aris Margono No. 7 Pontianak-Kalimantan Barat	081345103505
UNIVERSITAS				
No	**Nama**	**Bentuk**	**Alamat**	**Telepon**
4	Sekolah Tinggi Teologi Pontianak	Sekolah Tinggi	Jalan Perintis Gg. Remaja 2 - Kota Baru	(0561) 745781
5	Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan	Sekolah Tinggi	Jl. Gajah Mada 50 Kotak Pos 1051	0896-7244-5103

6	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak	Sekolah Tinggi	Jalan Gajah Mada No. 38 Pontianak	(0561) 734762
7	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak	Sekolah Tinggi	Jalan Gajah Mada No. 38	(0561) 734762
8	Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak	Sekolah Tinggi	Jl. Ahmad Yani No. 52 F, Pontianak	'081345329001
9	Poltekkes Kemenkes Pontianak	Politeknik	Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak	0812-5602-6808
10	Politeknik Tonggak Equator Pontianak	Politeknik	Jalan Fatimah 1-2 Pontianak	(0561) 767884
11	IKIP PGRI Pontianak	Institut	Jalan Ampera No. 88 Kota Baru Pontianak - Kalimantan Barat	(0561) 748219
12	Akademi Sekretaris Dan Manajemen Indonesia Pontianak	Akademi	Jalan Imam Bonjol No 82-88 P.O. Box 1139 Pontianak - Kalbar	0561) 761307
13	Akademi Manajemen Perusahaan Panca Bhakti	Akademi	Jalan St Abdurachman No 8	(0561) 733716
14	Akademi Keuangan & Perbankan Grha Arta Katulistiwa	Akademi	Jalan K H Ahmad Dahlan No 101	(0561) 765378
15	Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak	Akademi	Jalan Merdeka Nomor 55 Pontianak Kalimantan Barat 78112	(0561) 8186937
UNIVERSITAS				
No	**Nama**	**Bentuk**	**Alamat**	**Telepon**
16	Akademi Kebidanan St Benedicta Pontianak	Akademi	Jl. Merdeka No. 665 Pontianak Kalimantan-Barat	'(0561)733626
17	Universitas Widya Dharma	Universitas	Jalan HOS Cokroaminoto No 445	(0561) 731966

18	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak	Institut	Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78122	(0561) 734170
19	Politeknik AKBID AISYIYAH Pontianak	Universitas	Jl. Ampera, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	(0561) 6655112
20	STKIP PGRI Pontianak	Institut	Jl. Ampera No.88, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	(0561) 748219
21	Universitas Nahdlatul Ulama (Kelas Karyawan)	Universitas	Jl. Kh.A.Dahlan No.72, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak,	0859-1962-02500
22	STIE Budi Utomo	Universitas	Jl. Ampera No.GG 1-2, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak,	(0561) 586324
23	STMIK Pontianak	Universitas	Jl. Merdeka Barat No.374, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116	(0561) 735555
UNIVERSITAS				
No	**Nama**	**Bentuk**	**Alamat**	**Telepon**

24	Politeknik Putra Bangsa Pontianak	Universitas	Jl. Perintis Kemerdekaan, Dalam Bugis, Pontianak Tim., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243	(0561) 7057448
25	Universitas Muhammadiyah Pontianak	Universitas	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78123	(0561) 764571
26	Universitas Panca Bhakti	Universitas	Jl. Komyos Sudarso No.1, Sungai Beliung, Pontianak Bar., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78244	(0561) 774442
27	Universitas Tanjungpura	Universitas	Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115	(0561) 739630
Sumber : https://pontianak.go.id/sarana-prasarana/perguruan-tinggi				

2. Tenaga Kerja / Perburuhan
   a) Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri besar sedang tersebut yaitu sekitar 2.588 orang. Sedangkan Jumlah pencari kerja adalah sebagai berikut:

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

SD	SMP	SMU	SMK	D2	D3	S1	S2	JUMLAH
1	1	214	183	-	40	73	3	515
sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023								

b) Beberapa kasus mogok kerja yang dilakukan para karyawan/ buruh biasanya disebabkan oleh:
1. Kenaikan upah minimum regioanal (UMR) yang belumditetapkan.
2. Permasalahan kesejahteraan/hak-hak pekerja yang dianggap tidak memihak terhadap pekerja.

pekerja…..

3. Jam kerja yang tidak menentu
4. PHK sebelah pihak.
5. Masalah cuti dan upah jam lembur

c) Jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah 317.161 jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran Kota Pontianak adalah sebesar 12,38 persen atau sekitar 39.251 orang dari 317.161 angkatan kerja.

(sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023)

3. Kesehatan

Salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang kesehatan adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur dan pengadaan tenaga – tenaga kesehatan. Berikut adalah beberapa Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

FASILITAS / TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
Rumah Sakit	11
Rumah Sakit Bersalin	3
Puskesmas	23
Klinik/Balai kesehatan	36

Posyandu	293
Apotek	29
Dokter	1446
Perawat	2261
Bidan	553
Farmasi	349
Ahli Gizi	120
Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2023	

4. Kesenian

Seiring dengan arus reformasi maka kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya kota Pontianak bagi mereka warga keturunan Tionghua dapat berbangga hati karena kebudayaannya diakui di tingkat Nasional dan tahun baru Imlek dijadikan hari libur Nasional.

a) Kesenian khas tradisional wilayah hukum Polresta Pontianakantara lain :

1. Tari Zapin Tembung yang digunakan untuk persembahan
2. Tari Joung gan, merupakan tarian khas suku Dayak, aneka tarian adat suku Melayu maupun tarian khas suku Dayak tersebut banyak ditampilkan pada upacara perkawinan dan resepsi / penyambutan tamu.
3. Sadur / ronggeng merupakan kesenian khas dari salah satu suku Pendatang yaitu Suku Madura.
4. Barongsai / Naga merupakan kesenian khas Etnis Keturunan Tionghua.
5. Tari Menoreh Getah untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari
6. Tari Madu yang digunakan untuk simbol pertahanan dan martabat.

b) Wadah / tempat / sarana kesenian yang terdapat diwilayah Hukum Polresta Pontianak adalah sebagai berikut:

Sebagai berikut…..

1. Teater / sanggar sei.
2. Orkes.
3. Band.
4. Kasidah / Orkes Gambus.
5. Hadrah

c) Dalam wilayah Hukum Polresta Pontianak, sarana prasarana untuk menyalurkan bakat seni dari warga khususnya dari kalangan Remaja mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Daerah seperti diadakannya beberapa Festival Musik pada setiap tahunnya, digelarnya Pentas Bujang dan Dare Pontianak, dan lain – lain

5. Pariwisata
   a. Even Budaya
      1) Festifal Budaya Khatulistiwa

         Festival Budaya Bumi Khatulistiwa diselenggarakan rutin setiap tahun, kegiatan ini diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 1991. Kegiatan Festival ini di pusatkan di kota Pontianak yang dilaksanakan setiap bulan Maret dan antara bulan September s/d Oktober, bulan tersebut dipilih karena bertepatan dengan peristiwa alam Titik kulminasi Matahari

      2) Lomba Dayung Hias Tradisional

         Lomba Dayung hias tradisional untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1997 yaitu pada tanggal 22 Maret 1997 dengan memperlombakan sampan – sampan tradisional yang dihiasi dengan berbagai Ornament darimasing – masing Daerah. Lomba Dayung Hias Tradisional merupakan cabang olahraga yang dilombakan dalam setiap event budaya yang dilaksanakan di Kota Pontianak

      3) Gawai dayak Naik Dango

         Gawai dayak diselenggarakan setiap tahun yaitu sekitar bulan Mei yang dipusatkan di Rumah Radakng dan Rumah Panjang (Rumah adat dayak) di Jl. Sutoyo

Pontianak. Even ini diselenggarakan untuk menumbuh kembangkan budaya suku dayak yang masih berkembang seperti budaya seni, budaya sosial sebagai penduduk asli Kalimantan Barat.

4) Peristiwa Budaya

Peristiwa Budaya setiap tahun yang diadakan di kota Pontianak seiring dengan HUT Kota Pontianak yang jatuh pada tanggal 23 Oktober. Dalam kegiatan ini ditampilkan tarian-tarian, Permainan rakyat, serta kerajinan rakyat yang berkembang didaerah Kalimantan Barat.

5) Meriam Karbit / Kertiang Badong

Festival meriam karbit biasanya diselenggarakan pada bulan puasa (Ramadhan) menjelang hari Raya Idul Fitri. Masyarakat yang berada ditepian sungai Kapuas saling berhadapan dan membunyikan meriam karbit dan saling bersahutan. Festival ini dilanjutkan dengan Festival Keriang Badong, perayaan ini diramaikan oleh warga dengan memesang lampu minyak tanah dalam bentuk dan warna yang mencolok

6) Cap Go Meh dan Barongsai

Cap Go Meh adalah perayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Etnis Tionghoa. Kegiatan ini dilaksanakan 15 hari setelah Tahun Baru China (imlex) dan ditandai dengan pawai Naga dan diakhiri dengan kegiatan pembakaran naga di Pemakaman yayasan masing – masing marga keluarga Tionghoa. Dalam tradisi tersebut biasanya diramaikan dengan pesta kembang api, adapun Festival Kue Tradisional dilaksanakan pada bulan Juni pada setiap tahunnya. Sesuai dengan nama festival, dalam kegiatan ini di tampilkan berbagai jenis kue / makanan tradisional khas Kalimantan Barat.

barat.……

7) Pemilihan Bujang dare

Pemilihan Bujang Dare merupakan event rutin yang diselenggarakan oleh Pemkot Pontianak guna menjaring bibit-bibit pemuda pemudi yang memiliki potensi di bidang akademik maupun di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Bujang Dare yang telah terpilih nantinya diharapkan dapat mempromosikan berbagai potensi yang ada di Kota Pontianak.

8) Perkiraan Jadwal Kegiatan Masyarakat Tahun2024

TANGGAL	HARI BESAR / GIAT MASYARAKAT / PERINGATAN
1 Januari 2024	Tahun Baru Masehi
1 Januari 2024	Ibadah Misa dan kebaktian umat kristiani menyambut tahun baru 2023
1 Januari 2024	Hari Perdamaian Dunia
3 Januari 2024	Hari Departemen Agama
5 Januari 2024	Hari Korp Wanita Angkatan Laut (KOWAL)
5 Januari 2024	Hari ulang tahun PPP ke 49
10 Januari 2024	Hari Lingkungan Hidup Indonesia
10 Januari 2024	Hari HUT PDI Perjuangan ke 49
10 Januari 2024	Hari Tritura
15 Januari 2024	Peristiwa Malari
15 Januari 2024	HUT PKPI ke 23
15 Januari 2024	Hari Peristiwa Laut dan Samudera
25 Januari 2024	Hari Gizi dan Makanan
22 Januari 2024	Tahun Baru Imlek 2574
25 Januari 2024	Hari Kusta Nasional
28 Januari 2024	Memperingati Hari Jadi Prov. Kalbar
31 Januari 2024	Hari Lahir Nahdatul Ulama (NU)
28 Nov 2023 s.d 10	Kampanye Pemilu tahun 2024

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

Feb 2024	
2 Februari 2024	Hari lahan basah sedunia
5 Februari 2024	Hari Lahir Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)
6 Februari 2024	HUT Partai Gerindra ke 14
7 Februari 2024	HUT Partai Perindo ke 7
9 Februari 2024	Hari Pers Nasional
11 s/d 13 Februari 2024	Masa Tenang Pemilu 2024
14 Februari 2024	Pemungutan Suara Pemilu 2024
14 Februari 2024	Hari Valentine (Kasih sayang)
20 februari 2024	Hari Pekerja Indonesia
21 Februari 2024	Hari Bahasa Ibu
24 Februari 2024	Hari lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
28 Februari 2024	Hari Gizi Nasional
1 Maret 2024	Hari Kehakiman Indonesia
6 Maret 2024	Hari Kostrad
10 Maret 2024	HUT PARFI
11 Maret 2024	Hari Supersemar
18 Maret 2024	Hari Arsitektur Indonesia
20 Maret 2024	Hari Kehutanan Indonesia
21 Maret 2024	Hari Sindrom Down
22 Maret 2024	Hari Air Internasional
23 Maret 2024	Hari Meteorologi Sedunia
23 maret – 25 Maret 2022	Perayaan Titik Kulminasi Matahari

24 Maret 2024	Hari peringatan Bandung Lautan Api
29 Maret 2024	Hari Filateli Indonesia
30 Maret 2024	Hari Film Indonesia
1 April 2024	HUT Bank dunia
1 April 2024	Hari Penyiaran Nasional
6 April 2024	Hari Nelayan Indonesia
7 April 2024	Hari Kesehatan Indonesia
9 April 2024	Hari Penerbangan Nasional
15 April 2024	HUT Bank Kalbar
16 April 2024	HUT Partai Garuda
16 April 2024	HUT Kopassus
19 April 2024	Hari Hansip
21 April 2024	Hari Kartini
21 April 2024	Hari Konsumen Nasional
22 April 2024	Hari Bumi / Earth Day
24 April 2024	HUT GP Anshor ke 88
24 April 2024	Hari angkutan Nasional
27 April 2024	HUT HKTI ke 50
1 Mei 2024	Hari Buruh Sedunia
1 Mei 2024	Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat
2 Mei 2024	Hari Pendidikan Nasional
3 Mei 2024	Hari Surya
5 Mei 2024	Hari Lembaga Sosial Desa

8 Mei 2024	Hari Palang Merah Internasional
10 Mei 2024	Hari Jadi Kab. Sintang
11 Mei 2024	Hari POM TNI
12 – 13 Mei 2024	Memperingati Tragedi Trisakti
13 Mei 2024	Memperingati kerusuhan Mei 1998
17 Mei 2024	Hari Tani Nasional
17 Mei 2024	Hari Buku Nasional
18 Mei 2024	Kenaikan Isa Al Masih
20 Mei 2024	Hari Kebangkitan Nasional
21 Meil 2024	Milad PKS
21 Mei 2024	Memperingati Hari Reformasi & lengsernya SUHARTO
23 Mei 2024	HUT PKI
3 Juni 2024	Hari Pasar dan Modal Indonesia
5 Juni 2024	Hari Lingkungan hidup sedunia
8 Juni 2024	Hari Laut Internasional
10 Juni 2024	Hari Sosial Media
14 Juni 2024	Memperingati Hari kematian SYAFARUDIN (Mahasiswa Untan)
15 Juni 2024	Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN
17 Juni 2024	Hari Dermaga
21 Juni 2024	Hari Krida Pertanian
23 Juni 2024	Hari Konvensi Bonn
24 Juni 2024	Hari Bidan Indonesia
26 Juni 2024	Hari Anti Narkoba sedunia
28 Juni 2024	Hari berkabung daerah (tragedi Mandor berdarah)

29 Juni 2024	Hari Keluarga Berencana Nasional
1 Juli 2024	HUT Bhayangkara
1 Juli 2024	Hari Buah Nasional
1 Juli 2024	Hari Kelautan Nasional
5 Juli 2024	Hari Bank Indonesia
9 Juli 2024	Hari Satelit Palapa
12 Juli 2024	Hari Koperasi Indonesia
17 Juli 2024	Milad PBB
17 Juli 2024	HUT Partai Berkarya
22 Juli 2024	Hari Kejaksaan
23 Juli 2024	Milad PKB
23 Juli 2024	Hari Anak Nasional
23 Juli 2024	Hari KNPI
26 Juli 2024	HUT Partai NasDem
29 Juli 2024	Hari Bhakti TNI AU
31 Juli 2024	Hari Lahir Korps PII Wati
5 Agustus 2024	Hari Dharma Wanita Nasional
8 Agustus 2024	Hari ASEAN
10 Agustus 2024	Hari Veteran Nasional
10 Agustus 2024	Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
14 Agustus 2024	Hari Pramuka
17 Agustus 2024	Hari Proklamasi kemerdekaan RI
17 – 19 Agustus 2024	Perayaan/perlombaan Hari kemerdekaan RI

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

18 Agustus 2024	Hari Konstitusi Indonesia
19 Agustus 2024	Hari Departemen Luar Negeri
21 Agustus 2024	Hari Maritim Nasional
23 Agustus 2024	Milad PAN
24 Agustus 2024	HUT TVRI
1 September 2024	HUT Polwan
1 September 2024	Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN)
8 September 2024	Hari Aksara
8 September 2024	Hari Pamong Praja
9 September 2024	HUT Partai Demokrat
9 September 2024	Hari Olahraga Nasional
11 September 2024	Hari Radio RI
11 September 2024	Peringatan Serangan 11 September
17 September 2024	Hari Perhubungan Nasional
17 September 2024	HUT Palang Merah Indonesia
23 Sept – 25 sept 2024	Perayaan Titik Kulminasi Matahari
21 September 2024	Hari Perdamaian Dunia
23 September 2024	Hari Bahasa Isyarat Internasional
24 September 2024	Hari Agraria Nasional / Hari Tani
27 September 2024	Hari Pepostel
28 September 2024	Hari Kereta Api
28 September 2024	Hari Rabies Sedunia
28 September 2024	Hari Tunarungu Internasional

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

29 September 2024	Hari Sarjana
29 September 2024	Hari Jantung Sedunia
30 September 2024	G 30 S PKI
1 Oktober 2024	Hari Kesaktian Pancasila
1 Oktober 2024	Hari Bea Cukai
2 Oktober 2024	Hari Batik dunia
5 Oktober 2024	HUT TNI
9 Oktober 2024	Hari surat menyurat Internasional
10 Oktober 2024	Hari cuci tangan sedunia
14 Oktober 2024	Hari pangan sedunia
15 Oktober 2024	Hari Hak asasi Binatang
16 Oktober 2024	Hari Parlemen RI
17 Oktober 2024	Memperingati Hari pengetasan Kemiskinan Dunia
17 Oktober 2024	Hari Jadi Kota Singkawang
20 Oktober 2024	HUT Partai Golkar
22 Oktober 2024	Hari Santri
23 Oktober 2024	Memperingati Hari Jadi Kota Pontianak
24 Oktober 2024	HUT PBB
24 Oktober 2024	Hari Dokter Indonesia
28 Oktober 2024	Hari Sumpah Pemuda
29 Oktober 2024	Memperingati Hari KOPRI
30 Oktober 2024	Hari Keuangan
1 November 2024	Hari Inovasi Indonesia
3 November 2024	Hari Kerohanian

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

5 November 2024	Hari Cipta Puspa dan Satwa Nasional
10 November 2024	Hari Pahlawan
11 November 2024	HUT PSI
12 November 2024	Hari Kesehatan Nasional
12 November 2024	Hari Ayah Nasional
14 November 2024	HUT Brimob
14 November 2024	Hari Diabetes Internasional
16 November 2024	Hari Toleransi Internasional
16 November 2024	Hari Anak Internasional
18 November 2024	Milad Muhammadiyah
21 November 2024	Hari Pohon
22 November 2024	Hari perhubungan darat
25 November 2024	Memperingati Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
25 November 2024	Hari Guru / HUT PGRI
27 November 2024	Pemilu Walikota Pontianak
27 November 2024	Pemilu Gubernur Kalbar
29 November 2024	Memperingati Hari Solidaritas Rakyat Palestina
1 Desember 2024	Hari AIDS sedunia
1 Desember 2024	Hari OPM
3 Desember 2024	Hari penderita cacat
4 Desember 2024	HUT GAM
4 Desember 2024	Hari Arteleri
4 Desember 2024	Hari Belanja Online
9 Desember 2024	Hari Anti Korupsi sedunia

10 Desember 2024	Hari HAM
10 Desember 2024	Hari Transmigrasi
13 Desember 2024	Hari Nusantara
15 Desember 2024	Hari Infantri
19 Desember 2024	Hari Bela Negara
20 Desember 2024	Hari Kesetiakawanan Sosial
21 Desember 2024	HUT Partai Hanura
22 Desember 2024	Hari Ibu
22 Desember 2024	Hari Sosial
23 Desember 2022	Akhir masa jabatan Walikota Pontianak
22 Desember 2024	Hari (KOWAD)
24-25 Desember 2024	Hari Raya Natal
26 Desember 2024	Peringatan Tsunami aceh
31 Desember 2024	Perayaan pergantian malam Tahun Baru

b. Tempat-tempat Wisata:

1) Bangunan Masjid Jami yang didirikan pada Jaman Sultan Syarif Abdurachman pada tanggal 23 Oktober 1771 M seperti tanggal berdirinya Kota Pontianak yang terdapat diwilayah kampung dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.
2) Bangunan Kraton Kadariah Terletak di Kampung dalam Bugis yang dibangun oleh Sultan syarif Abdurrachman.
3) Masjid Jami Pontianak terletak di kecamatan Pontianak timur yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman, salah seorang yang terkemuka di Kota Pontianak,Pada tanggal 23 Oktober 1771 M, sebagai tanda berdirinya Kota

Pontianak.

4) Tugu Khatulistiwa sebagai titik 0º yang terletak di kecamatanPontianak Utara.
5) Musium barang – barang Kuno / Purbakala terletak di Jl. A. YaniPontianak selatan.
6) Rumah Adat Dayak terletak di Jl. Letjen Sutoyo PontianakSelatan.
7) Rumah Radakng terletak di Jl. Sutan Syahrir Pontianak
8) Alun – alun Kapuas terletak di Depan Kantor Walikota Pontianak
9) Kolam renang Oevang Oeray di Komp. GOR Pangsuma
10) Kolam renang Mitra Khatulistiwa Jl. Prof. M. Yamin
11) Kolam renang Muara Kapuas Jl. Komyos Sudarso Kel. SungaiBeliung Kec. Pontianak Barat
12) Kolam renang Ampera Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota
13) Waterfront City Jl. Tanjungpura (tepian sungai Kapuas)
14) Taman Untan/Digulis dan Taman Sepeda Jl. A. Yani Pontianak.

6. Keamanan

a) Kesatuan TNI/Polri

Diwilayah Hukum Polresta Pontianak terdapat Markas Komando satuan TNI / POLRI sebagai berikut:

1) Polri
   a. Polda Kalimantan Barat
   b. Dit Sabhara kalbar
   c. Dit Narkoba kalbar
   d. Dit Polair kalbar
   e. Polsek dan Pospol di setiap Kecamatan
2) Angkatan Darat (AD)
   a. Kompi bantuan 643 batu layang

Batu layang…..

b. Kodim 1207 Pontianak 8 Koramil sbb:

(1) Koramil Pontianak Utara

(2) Koramil Pontianak Barat

(3) Koramil Pontianak selatan

(4) Koramil Pontianak Timur

3) Angkatan Laut

a. Lantamal Pontianak yang berkedudukan di Jalan Komyos sudarso Jeruju pontianak Barat.

b. Pos – Pos Angkatan Laut menyebar diwilayah hukum Lanal Pontianak.

4) Angkatan Laut (AU)

Mess TNI Angkatan Udara yang terdapat di Jl.Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan.

5) Kantor Polri dan TNI

KANTOR POLISI DAN TNI		
NO	**NAMA**	**ALAMAT**
1.	Polda Kalimantan Barat	Jl. Ahmad Yani Pontianak
2.	Polresta Pontianak	Jl. Johan Idrus No. 1 Kec. Pontianak Selatan Telpon : 0561 - 734900
3.	Polsekta Pontianak Kota	Jl. Ampera Telpon : 0561 - 7558880
4.	Polsekta Pontianak Barat	Jl. Komyos Sudarso Telpon : 0561-774766
5.	Polsekta Pontianak Selatan	Jl. Letjen Sutoyo Telpon : 0561 - 736184

b) Instansi Pemerintahan,BUMN dan BUMD

INSTANSI PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT		
NO	**NAMA**	**ALAMAT**
1	**2**	**3**
1	Kantor Gubernur Kalimantan Barat	Jl. Jenderal Ahmad Yani Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 Telpon : (0561) 736541

2.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	Jl. Sutan Syahrir No.7 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota Telp: +62(0561) 734602, 733756 Fax: +62(0561) 732976 e-Mail: pendidikan @ kalbarprov.go
3.	**Dinas Kesehatan**	Jl. Dr. A. Hadi No.7, Pontianak Telp: +62(561)730118-734706 e-Mail: kesehatan @ kalbarprov.go.id
4.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp: +62(561)732350 e-Mail: dpu @ kalbarprov.go.id
5.	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	Jl. A. Yani, Pontianak Telp: +62(561)710766 e-Mail: disnakertrans @ kalbarprov.go.id
6.	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	Jl. Slt. Abdurrahman No.101, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 Telp: +62(561) 766375 e-Mail: bp3akb @ kalbarprov.go.id
7.	**Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Jalan Adi Sucipto No.48, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 Telp: +62(561) 736144 e-Mail: disnakeswan @ kalbarprov.go.id
8.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	JL M. Hambal No. 5, Pontianak Kalbar Telp: +62(561) 733742 e-Mail: dpmd @ kalbarprov.go.id
9.	**Dinas Perhubungan**	Jl. Adi Sucipto Km.9,2 Sungai Raya Telp: +62(561)721466 e-Mail: dishub @ kalbarprovprov.go.id
10.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	Jl. Adi Sucipto No. 50 Pontianak Telp: +62(561) 8173627 e-Mail: diskominfo @ kalbarprovprov.go.id

11.	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	Jl. Sutan Syahrir No. 5 Pontianak Telp: +62(561)723771 e-Mail: koperasi @ kalbarprov.go.id
12.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	Jl. Sutan Syahrir No. 17 Pontianak Telp: +62(561)743491 e-Mail: bpmd @ kalbarprov.go.id
13.	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	Jl. Dr. Soetomo, Pontianak Telp: +62(561)740832 e-Mail: dispora @ kalbarprov.go.id
14.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	Jl. Letjen Sutoyo, Pontianak Telp: +62(561) e-Mail: bpkd @ kalbarprov.go.id
15.	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Jl. Sutan Syahrir, Pontianak Telp: +62(561)732521 e-Mail: dislautkan @ kalbarprov.go.id
16.	**Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Jl. Alianyang, Pontianak Telp: +62(561)734017 e-Mail: tahanpangan @ kalbarprov.go.id
17.	**Dinas Perkebunan**	Jl. M. Hambal, Pontianak Telp: +62(561)732642-766038 e-Mail: disbun @ kalbarprov.go.id
18.	**Dinas Kehutanan**	Jl. S. Abdurrahman, Pontianak Telp: +62(561)734029 e-Mail: dishut @ kalbarprov.go.id
19.	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	Jl. Sutoyo, Pontianak Telp: +62(561)749221 e-Mail: distamben @ kalbarprov.go.id

20.	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	Jl. Sutan Syahrir, Pontianak Telp: +62(561)734229 e-Mail: disperindag @ kalbarprov.go.id
21.	**Dinas Sosial**	Jl. Sutan Syahrir, Pontianak Telp: +62(561) e-Mail: dinsos @ kalbarprov.go.id
22.	**Dinas Perumahan Rakyat**	Jl. Adisucipto No 50 Pontianak Telp: +62(561) 764616 e-Mail: perkimlh @ kalbarprov.go.id
23.	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Jl. Achmad Sood No. 25 Pontianak, Kode Pos 78116 Telp: +62(561) 583047 e-Mail: dukcapil @ kalbarprov.go.id

INSTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	
NAMA	**ALAMAT**
2	**3**
Kantor Walikota Pontianak	Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak
Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak
A S I S T E N	
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak
S T A F A H L I	
Staf Ahli bidang Keuangan dan Pembangunan	Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak
Staf Ahli bidangHukum dan Politik	Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak
Staf Ahli bidang Pemerintahan dan SDM	Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak
DINAS	
Sekretariat DPRD Kota Pontianak	Jl. Sultan Abdurrahman Kec. Pontianak Kota
Dinas Kesehatan	Jl. Jend. A. Yani, No. 30 e-mail : dinkes@pontianakkota.go.id
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Sutoyo No. 1 Telp. (0561) 736711 e-mail : dinas-pendidikan@pontianakkota.go.id

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	Gg. Pendidikan, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78242 dppp@pertanian.pontianakkota.go.id
Dinas Perhubungan	Jl. Alianyang Telp. (0561) 778116 – 767136 e-mail : dishub@pontianakkota.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Zainuddin No.36, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243 diskominfo@pontianakkota.go.id
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Jl. Alianyang No. 7c Telp. (0561) 730416 e-mail : disperindag@pontianakkota.go.id
Dinas Sosial	Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1B, Pontianak Selatan, Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 dinsos@pontianakkota.go.id
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	Jl. Letjen Sutoyo (Kantor Terpadu) No. 1 Telp. (0561) 736290 Fax 734239 e-mail : capil@pontianakkota.go.id
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Jend. A. Yani Telp. (0561) 732300 e-mail : pu@pontianakkota.go.id
Dinas Lingkungan Hidup	Jalan Alianyang No. 7B, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dlh@pontianakkota.go.id
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	jalan Sutoyo, Parit Tokaya, South Pontianak, Pontianak, West Kalimantan 78113 dprkp@pontianakkota.go.id
Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Sutoyo No.1, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243 dpmtkptsp@pontianakkota.go.id
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Jl. Sutoyo (Kantor Bersama) e-mail:
Sekretaris KPU Kota	Jl. Johar No. 1A 78111 ppidkotapontianak@gmail.com
Dirut Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa	Jalan Imam Bonjol No.430, Benua Melayu Laut, Pontianak Selatan, Benua Melayu Laut, Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243 humas@pdamtirtakhatulistiwa.com

Kantor Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik	JL. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113 kesbangpol@pontianakkota.go.id
Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa	ruko pasar flamboyan, Jl. Gajah Mada, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie	Jl. Komyos Sudarso No.1, Sungai Beliung, Pontianak Bar., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78244 rsudssma@yahoo.com
Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Zainuddin, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78111 satpolpp@pontianakkota.go.id
Dinas Pengendalian Pendudduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Rahadi Usman No.3, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78111 dppkbpppa@pontianakkota.go.id
Dinas Perpustakaan	Jl. Alianyang No.7, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 distaka@pontianakkota.go.id
B A D A N	
Inspektorat Kota Pontianak	Jl. Zainuddin No.5, Tengah, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78111 inspektorat@pontianakkota.go.id
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Zainuddin No. 5 Telp (0561) 734294 - 733045 – 733045 e-mail : bappeda@pontianakkota.go.id
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jl. Rahadi Usman No. 3 Telp. (0561) 732570 - 733041 - 733042 Fax. 739616 e-mail : kepegawaian@pontianakkota.go.id
Badan Keuangan Daerah	Jalan Sutoyo, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113 bkd@pontianakkota.go.id
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Jl. Letjen Sutoyo

Badan Narkotika Nasional (BNN)	Jl. Sultan Hamid II Kec. Pontianak Timur
C A M A T	
Camat Pontianak Kota	Jl. Alianyang No, 10D, Sungai Bangkong, Pontianak, 78113 camatkota@pontianakkota.go.id
Camat Pontianak Barat	Jl. Tabrani Ahmad, Sungai Jawi Dalam, Pontianak, 78244 camatbarat@pontianakkota.go.id
Camat Pontianak Utara	Jl. Khatulistiwa No. 2, Siantan Hilir, Pontianak, 78243 camatutara@pontianakkota.go.id
Camat Pontianak Timur	Jl. HM Rasuna Said No. 1 Tj. Hulu, Pontianak, 78232 camattimur@pontianakkota.go.id
Camat Pontianak Selatan	Jl. Nirbaya Gg. Mentari, Kota Baru, Kota Pontianak, 78121 camatselatan@pontianakkota.go.id
Camat Pontianak Tenggara	Jl. Sejahtera 1, Pontianak, 78117 camattenggara@pontianakkota.go.id

PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN		
1	**KECAMATAN PONTIANAK KOTA**	Jl. Pangeran Natakusuma Telp. (0561) 734936 e-mail : camat-kota@pontianakkota.go.id
	Kelurahan Mariana	Jl. Lembah Murai, Telp. (0561) 767925
	Kelurahan Tengah	Jl. Cendrawasih, Telp. (0561) 577602
	Kelurahan Darat Sekip	Jl. KHA. Dahlan, Telp. (0561) 764840
	Kelurahan Sungai Bangkong	Jl. Alianyang, Telp. (0561) 767927

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

	5. Kelurahan Sungai Jawi	Jl. HM Suwignyo, Telp. (0561) 577964
2	**KECAMATAN PONTIANAK BARAT**	Jl. Tabrani Ahmad Telp. (0561) 772425 e-mail : camat-barat@pontianakkota.go.id
	Kelurahan Sungai Jawi Luar	Jl. Komyos Sudarso, Telp. (0561) 777428
	Kelurahan Sungai Jawi Dalam	Jl. Tabrani Ahmad, Telp. (0561) 780694
	Kelurahan Pal Lima	Jl. Husein Hamzah, Telp. (0561) 774835
	Kelurahan Sungai Beliung	Jl. Atot Achmad, Telp. (0561) 779073
3	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	Jl. Letjend. Sutoyo Telp. (0561) 732467 e-mail : camat-selatan@pontianakkota.go.id
	Kelurahan Benua Melayu Laut	Jl. Irian Tanjungpura, Telp. (0561) 765932
	Kelurahan Benua Melayu Darat	Jl. Setiabudi, Telp. (0561) 765995
	Kelurahan Parit Tokaya	Jl. Letjend. Sutoyo telp. (0561) 760726
	Kelurahan Kota Baru	Jl. Prof. M. Yamin, Gg. Kurnia, Telp. (0561) 7154341
	Kelurahan Akcaya	Jl. A. Rachman Saleh, Telp. (0561) 745357

4	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	Jl. Rasuna Said Telp. (0561) 742305 e-mail : camat-timur@pontianakkota.go.id
	Kelurahan Tanjung Hilir	Jl. Tritura, Telp. (0561) 570724
	Kelurahan Tanjung Hulu	Jl. Ya' M. Sabran, Telp. (0561) 570029
	Kelurahan Dalam Bugis	Jl. Tanjung Raya I, Telp. (0561) 570543
	Kelurahan Tambelan Sampit	Jl. Pemuda, Telp. (0561) 570723
	Kelurahan Saigon	Jl. Tanjung Raya II, Telp. (0561) 571190
	Kelurahan Banjar Serasan	Jl. Tanjung Harapan, Telp. (0561) 57141
	Kelurahan Parit Mayor	Jl. Tanjung Raya II, Telp. (0561) 7071045
5	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	Jl. Khatulistiwa No. 2 Telp. (0561) 881386 e-mail : camat-utara@pontianakkota.go.id

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

RUMAH TAHANAN		
NO	**NAMA**	**ALAMAT**
1.	Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2 A Pontianak	Jl. Sungai Raya Dalam Km. 13 Kec. Pontianak Tenggara

KANTOR TELKOM		
NO	**NAMA**	**ALAMAT**
1.	Telkom Pontianak	Jl. Teuku Umar No. 2 Kec. Pontianak Kota

KANTOR PLN		
NO	**NAMA**	**ALAMAT**
1.	PT. PLN (Persero) UP 3 Pontianak	Jl. Jend. A. Yani No. 25 Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan Telpon : 0561 734420
2.	PT. PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat	Jl. Letjend. Suprapto No. 50 G Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Telpon : 0561 762580
3.	PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Kalimantan I	Jl. Gst. Sulung Lelanang No. 3 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Telpon : 0561 734120
4.	PT. PLN (Persero) AP2B Kalimantan Barat	Jl. Karya Baru No. 60 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Telpon : 085245546209
5.	PT. PLN (Persero) APD Kalimantan Barat	Jl. Ismail Marzuki No. 15 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Telpon : 0561 736896
6.	PT. PLN (Persero) PLN Rayon Sungai Jawi	Jl. RE. Martadinata Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Telpon : 0561 771440

PDAM		
NO	**NAMA**	**ALAMAT**
1	PD. Tirta Khatulistiwa	Jl. Imam Bonjol No. 430 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan. Telpon : 0561 769999

c) Kejadian Menonjol

Tidak ada kejadian menonjol yang mengganggu situasi kamtibmas dan mengundang perhatian masyarakat di wilayah hukum PolrestaPontianak selama tahun 2023.

d) Lain-lain

Gangguan Kamtibmas Lain yang rawan terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Kejadian yang Berimplikasi Kontijensi dapat terjadi sewaktu- waktu seperti bencana alam (banjir dan angin putting beliung) dan konflik sosial yang melibatkan antar suku / agama yang berbeda.
2. Aksi Unjuk Rasa / Demonstrasi.
3. Musim kemarau yang berakibat pada kebakaran/pembakaranlahan dan kabut asap
4. Sengketa lahan
5. Postingan di media sosial yang bersifat provokatif dan Hoax
6. Aksi – aksi Intimidasi / teror

b. Analisa

Pelaksanaan tugas Polri masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi Polresta Pontianak Polda Kalbar yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar yang didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya

Daya…..

Manusia (SDM) Polresta Pontianak Polda Kalbar dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkan kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan 4 jenis kejahatan, terorisme, korupsi dan Narkoba menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

Pelaksanaan tugas Polresta Pontianak Polda Kalbar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Polresta Pontianak Polda Kalbar:

1) kekuatan (*strenght*)

a) Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban kepa

Pelayanan di…..

untuk mewujudkan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat melalui penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan, Polda Kalbar mulai tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 Mapolda Polda Kalbar, 13 Polres/ta, 153

(1) kekuatan…..

Polsek (Polsek : 16 Urban, 118 Rural dan 21 Prarural), 3 Polsek Kawasan dan 9 Polsubsektor;

b) kekuatan personel Polda Kalbar Tahun 2023 (Juli), sebanyak 11.379 pers.

c) dukungan Sarpras Polda Kalbar yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan peralatan operasional seperti; alat transportasi udara (helikopter), transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Mapolda Kalbar sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri;

d) komitmen bersama (MoU) Polri (Polda Kalimantan Barat) dengan Polis Diraja Malaysia Kontinjen Serawak dalam rangka merealisasikan komitmen bersama dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara *(Transnational Crime)*;

e) personel Polda Kalbar telah membuat dan menandatangani komitmen integritas dan *zero tollerance* terhadap penyimpangan;

f) kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kalbar yang terus meningkat yang merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dilapangan;

g) reputasi/kepercayaan Polda Kalbar oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penanganan kasus yang menjadi atensi pemerintah dalam hal penanganan *Trafficking in person, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Trading, Illegal Fishing*, korupsi, narkoba, kasus penyeludupan kendaraan bermotor, pelanggaran lintas batas orang dan barang;

h) adanya koordinasi dan kerjasama Polda Kalbar dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi tantangan tugas Polri.

h). adanya…..

2) kelemahan (*weakness*)

a) terdapat 3 Polsek yang belum memiliki Mako, yaitu Polsek Muara Pawan, Benua Kayong (Polres Ketapang) dan Lumar (Polres Bengkayang);

b) terdapat 11 Kecamatan belum terbentuk kesatuan baik Polsek ataupun Polsubsektor yaitu Kec. Pontianak Tenggara (Polresta Pontianak), Selakau Timur (Polres Sambas), Kec. Lembah Bawang, Tujuh Belas (Polres Bengkayang), Kec. Banyuke Hulu (Polres Landak), Kec. Pinoh Utara dan Kec. Tanah Pinoh (Polres Melawi), Kec. Singkup, Hulu Sungai dan Kec. Pemahan (Polres Ketapang) serta Kec. Kepulauan Karimata. (Polres Kayong Utara);

c) belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) sehingga masih sangat diperlukan peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri dilapangan;

d) panjangnya garis perbatasan wilayah Kalbar - Indonesia dengan Serawak-Malaysia yaitu 966 Km yang memerlukan pengamanan dari Polri, namun Polda Kalbar baru memiliki 5 Polsubsektor Perbatasan dan 4 Pos Pelayanan Kepolisian Perbatasan;

e) terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik tersertifikasi sehingga hasil didik di SPN Polda Kalbar yang diharapkan oleh standar pendidikan dan kualifikasi belum memadai. Hal ini dapat dilihat bila di hadapkan dengan permasalahan organisasi maupun pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum yang semakin komplek, maka masih perlu untuk ditingkatkan dalam pemenuhan kuantitas tenaga pendidik dan hasil didik yang berkualitas;

f) personel Polda Kalbar memiliki kesempatan yang sangat terbatas baik di fungsi operasional maupun pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian maupun ketrampilan di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi informasi dan bio kimia di bidang kriminalitas yang modern. Hal ini dapat dilihat dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan

f). personal…..

yang semakin canggih serta masih tingginya proses birokrasi dalam penyelesaian perkara, personel Polri masih sangat terbatas kemampuan dan pengetahuannya;

g) kultur budaya organisasi Polri termasuk di Polda Kalbar belum menunjukan kemajuan yang optimal yang terindikasi dari masih terdapatnya anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, meskipun persentasenya bila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri pada Polri tidak signifikan namun dengan adanya pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan Polri oleh masyarakat;

h) kualitas pelayanan Polda Kalbar kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kuantitas pelayanan, jenis pelayanan dan waktu pelayanan yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadahi dan dukungan teknologi informasi sehingga mampu meminimalkan potensi KKN atau penyalahgunaan wewenang.

3) peluang (*opportunities*)

a) kebijakan Pemerintah Pusat yang memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan sedang berjalan;

b) kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan *good government*, *clean governance*, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima;

c) peningkatan anggaran operasional kepolisian dan tunjangan kinerja;

d) adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kalbar kepada Polda Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kalbar;

e) adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kalbar dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Polda Kalbar dan para Kasatwil;

e). adanya…..

f) semakin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;

g) adanya atensi pemerintah pusat tentang prioritas perencanaan pembangunan diwilayah perbatasan.

h) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polda Kalbar yang secara terus menerus berlanjut merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.

i) adanya aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan satuan kewilayahan.

4) ancaman (*threat*)

a) kejahatan lintas batas antar negara dan antar pulau yang terjadi diwilayah hukum Polda Kalbar terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara *(Transnational Crime)* meliputi :

(1) pelanggaran lintas batas orang dan barang.

(2) *trafficking in person*.

(3) penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.

(4) penyelundupan kendaraan.

(5) *illegal loging, illegal mining, illegal trading dan illegal fishing*;

(6) pengaruh budaya / adat istiadat.

b) wilayah Kalimantan Barat yang memiliki pantai sepanjang 1.163 Km yang merupakan corong barat pertahanan Indonesia bagian Barat serta laut yang demikian luas juga menimbulkan kerawanan tersendiri, karena dapat mengakibatkan terjadinya pencurian ikan dan hasil laut lainnya, penyelundupan, imigran gelap dan rawan akses peredaran gelap Narkoba;

b). wilayah…..

c) potensi kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai. Demikian juga kontinjensi lainnya yang berkaitan dengan unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, buruh, kelompok islam radikal memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat Kepolisian secara berlanjut;

d) sulitnya masyarakat perbatasan (Kalbar - Malaysia) untuk mengakses informasi baik media cetak maupun elektronik dari dalam negeri dan mudahnya masyarakat perbatasan mengakses informasi dari luar (Malaysia) akan berdampak negatif terhadap wawasan kebangsaan dan lunturnya nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa;

e) makin berkembangnya wilayah perbatasan yang ditandai dengan diresmikannya PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar Polres Sambas, PLBN Badau Polres Kapuas Hulu dan akan direncanakan berikutnya Jagoi Babang Polres Bengkayang dan Ketungau Hulu Polres Sintang, tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan jaringan teroris dan narkoba sebagai jalur alternatif untuk masuk ke wilayah Indonesia;

f) masih banyaknya pulau - pulau kecil yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni belum dibangun Pos Pelayanan Kepolisian sehingga rawan terjadinya tindak kejahatan dan sengketa pulau dengan negara tetangga;

g) adanya perbedaan status sosial dan ekonomi yang mencolok antara masyarakat Kalbar - Indonesia di perbatasan dengan masyarakat negara tetangga Serawak-Malaysia, sehingga memberikan pengaruh psikologis bagi masyarakat perbatasan yang akhirnya timbul kecemburuan sosial dan mendorong masyarakat perbatasan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dan melanggar hukum;

h) Masalah perkebunan kelapa sawit berpotensi menimbulkan konflik, dikarenakan lahan perkebunan yang digunakan sesuai izin yang

h) masalah…..

dikeluarkan oleh pemerintah masuk dalam wilayah hutan masyarakat / tanah adat dan ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma.

2. Identifikasi Masalah

Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polresta Pontianak Polda Kalbar pada tahun 2024 diprediksi akan semakin berat terlebih pada tahun 2024 merupakan tahun politik (Pemilu), dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

a. Potensi konflik Pemilu baik pada saat pelaksanaan dan pasca Pemilu 2024.

b. menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan di Kalbar.

c. proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, perkembangan teknologi informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (*cyber crime*) dan penyebaran informasi hoaks yang melanggar UU IT, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat;

d. peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme, keberadaan dan kegiatan kelompok teroris di Kalbar masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah, saat ini kejahatan siber serta kejahatan konvensional semakin marak;

e. penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses Ilegal perlu ditingkatkan Polresta Pontianak Polda Kalbar, mengingat semakin maraknya kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani Polresta Pontianak Polda Kalbar secara profesional, serta Polda Kalbar perlu untuk

e. penegakan…..

mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat ke-bhinekaan di media sosial;

f. pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi, *transnational crime* dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh Polresta Pontianak Polda Kalbar mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani secara profesional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadi antensi pemerintah;

g. kesejahteraan aparatur Polresta Pontianak Polda Kalbar dan pelayanan kepolisian lainnya di wilayah perbatasan NKRI di Lokasi Prioritas (Lokpri) masih sangat terbatas sehingga memerlukan kajian dan usulan untuk peningkatan tunjangan kinerja, pemenuhan rumah dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja secara bertahap;

h. penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan Wasrik dan kerja sama dengan pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polresta Pontianak Polda Kalbar yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

i. pengembangan aparatur Polresta Pontianak Polda Kalbar yang fokus untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi masih belum optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan dan latihan, rekrutmen dan pembinaan karier yang bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme

j. terpenuhinya Sarpras Polresta Pontianak Polda Kalbar sesuai dengan kebutuhan minimal Almatsus dan Alpalkam Polri masih perlu untuk ditingkatkan mengingat Sarpras sangat diperlukan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi Polda kalbar

a. Visi Polda kalbar

Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib.

b. Misi Polda Kalbar

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

2. Visi dan Misi Polresta Pontianak Polda Kalbar

2.visi dan misi…..

a. Visi Polresta Pontianak Polda Kalbar

"Terwujudnya Kota Pontianak Yang Aman dan Tertib".

b. Misi Polresta Pontianak Polda Kalbar

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kota Pontianak

3. Tujuan Jangka Menengah

a. Polda Kalbar

Adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah "Polda Kalbar yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2024".

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat
2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
3) modernisasi pelayanan Polri;
4) mewujudkan Polri yang profesional;
5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Polresta Pontianak

Adapun tema pembangunan Polresta Pontianak Polda Kalbar adalah "Polresta Pontianak Polda Kalbar yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2024".

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kota Pontianak.
2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
3) modernisasi pelayanan Polri;
4) mewujudkan Polri yang profesional;

menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya

4. Sasaran Prioritas

a. Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2024 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri, yaitu sebagai berikut:

a. Polda…….

1) **pertama** “Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan”;
2) **kedua** “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif”;
3) **ketiga** “Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”;
4) **keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”;
5) **kelima** “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern**”**;
6) **keenam** “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I”.

b. Polresta Pontianak

Sasaran Prioritas Polresta Pontianak Polda Kalbar tahun 2024 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri, yaitu sebagai berikut:

1) **pertama** “Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Kota Pontianak”.
2) **kedua** “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polresta Pontianak”.
3) **ketiga** “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”.
4) **keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polresta Pontianak”.
5) **kelima** “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern”.
6) **keenam** “Penguatan Pengawasan yang Efektif Berbasis TI guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2024

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar sebagai berikut:

1.Arah…..

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan",** yaitu:

1) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
b) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);
c) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (prog.Harkamtibmas/Giat 3115);
d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (prog.Harkamtibmas/Giat 3117);
f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (prog.Harkamtibmas/Giat 3150).

2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
c) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
d) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog.Harkamtibmas /Giat 3134);
e) penyelenggaraan kepolisian udara (prog.Harkamtibmas/ Giat 3135);
f) penindakan tindak pidana terorisme (Prog.lidiksidik/Giat 3143);
g) pengelolaan Multimedia (Prog.dukma/Giat 3149).

g). Pengelolaan….

3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (Cooling System);

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).

4) Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) analis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
d) pelayanan psikologi Anggota Polri (prog.Harkamtibmas/ Giat 3110).

5) meningkatkan Gakkum Lantas menggunakan ETLE dan tilang manual serta mengoptimalkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saa terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).

6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

6) meningkatkan…..

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076;
c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087).

7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2024;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133);
d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);

8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial; pengamanan unjuk rasa; dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
c) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079).

9) meningkatkan kerjasama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Harkamtibmas;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) kerja sama keamanan dan ketertiban K/L (prog.Harkamtibmas/Giat 3120);

a) kerja sama…..

b) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 3122).

10) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);
b) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog. Harkamtibmas/Giat 3131);
c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog. Harkamtibmas/Giat 5087);
d) pengendalian operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5080);
e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);
f) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif"**, yaitu:

1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pengembangan peralatan Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 3084);

2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055);
b) penyelenggaraan teknologi informasi (Prog.dukma/Giat 3071).

3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

3) Meningkatkan…..

a) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 5062).

4) meningkatkan quick response kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pelayanan Kesehatan Polri (Prog.dukma/Giat 3072).

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel"**, yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat3140);
b) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog. lidiksidik/Giat 3141);
c) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
d) penindakan tindak pidana Narkoba (Prog.lidiksidik/Giat 3144);
e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (Prog.lidiksidik/Giat 3145);
f) penindakan tindak pidana korupsi (Prog.lidiksidik/Giat 3146);
g) penindakan tindak pidana Siber (Prog.lidiksidik/Giat 3151);
h) penindakan tindak pidana tertentu (Prog.lidiksidik/Giat 5083);
i) penyelenggaraan kepolisian perairan (Prog.lidiksidik/Giat 3134);
j) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130).

j) Pembinaan…..

2. melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;

   Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

   penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);

3. meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

   pengawasan penyidikan (Prog.lidiksidik/Giat 5086)

4. mengoptimalkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

   Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan pendataan dan pelayanan informasi kriminal nasional (Prog.lidiksidik/Giat 5084).

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:

   1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

      penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5070);

   2) mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

      penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052)

   3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

      pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107)

3) meningkatkan…..

4) meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) pembinaan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5069);
   b) pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107).
5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
   b) pembinaan karier personel Polri (Prog.dukma/Giat 3108);
   c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).
6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105)
7) meningkatkan ketrampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100)
8) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) pelayanan kesehatan (Prog.dukma/Giat 3072);
   b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062);
   c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern”**, yaitu:
   1) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus

e.arah…..

Alpalhankam Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067);

2) memenuhi rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog. modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062).

3) pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084).

4) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);

5) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084)

b) membangun sistem komunikasi perbatasan dan pulau terluar (Prog.dukma/Giat 5055).

6) mengoptimalkan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/ pelaporan masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan hotline 110 (Prog.dukma/Giat 5055).

f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I"**, yaitu:

f. arahan.……

1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.lidiksidik/Giat 3091);
   b) pengawasan penyidikan (Prog.dukma/Giat 5086);
2) mengoptimalkan Saber Pungli (sapubersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).
3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) penyelenggaraan pengamanan internat Polri (Prog.dukma/Giat 3089);
   b) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.lidiksidik/Giat 3068);
4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) penyusunan kebijakan Polri (Prog.dukma/Giat 5051);
   b) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
   c) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.dukma/Giat 3068);
5) menata kelembagaan dan tata laksana Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052).
6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053).

6) meningkatkan…..

2. Arah kebijakan dan Strategi Polresta Pontianak Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Polresta Pontianak prioritas Polda Kalbar Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polresta Pontianak Polda Kalbar sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan",** yaitu:

1) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
b) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);
c) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (prog.Harkamtibmas/Giat 3115);
d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (prog.Harkamtibmas/Giat 3117);
f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (prog.Harkamtibmas/Giat 3150).

2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
c) pengelolan Multimedia (Prog.dukma/Giat 3149).

c) pengelolaan…..

3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (Cooling System);

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).

4) Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) analis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
d) pelayanan psikologi Anggota Polri (prog.Harkamtibmas/ Giat 3110).

5) meningkatkan Gakkum Lantas menggunakan ETLE dan tilang manual serta mengoptimalkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saa terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).

6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

6). meningkatkan…..

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076;
c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087).

7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2024;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133);
d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);

8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial; pengamanan unjuk rasa; dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
c) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079).

9) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);
b) pengendalian operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5080);

b) pengendalian…..

c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);

d) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif"**, yaitu:

1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 3084);

2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055);
   b) penyelenggaraan teknologi informasi (Prog.dukma/Giat 3071).

3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
   b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 5062).

4) meningkatkan quick response kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
   b) pelayanan Kesehatan Polri (Prog.dukma/Giat 3072).

b). pelayanan…..

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel"**, yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

   Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

   a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat3140);
   b) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog. lidiksidik/Giat 3141);
   c) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
   d) penindakan tindak pidana Narkoba (Prog.lidiksidik/Giat 3144);
   e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (Prog.lidiksidik/Giat 3145);
   f) penindakan tindak pidana korupsi (Prog.lidiksidik/Giat 3146);
   g) penindakan tindak pidana tertentu (Prog.lidiksidik/Giat 5083);
   h) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130).

2. melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;

   Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

   penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);

3. meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

   pengawasan penyidikan (Prog.lidiksidik/Giat 5086)

4. mengoptimalkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

   Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan pendataan dan pelayanan informasi kriminal nasional (Prog.lidiksidik/Giat 5084).

4. mengoptimalkan…..

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:

1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5070);

2) mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052)

3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107)

4) meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5069);
b) pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107).

5) meningkatkan pengelolaan SDM yang h b). pembinaan…..

arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
b) pembinaan karier personel Polri (Prog.dukma/Giat 3108);
c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).

6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105)

6) meningkatkan…..

7) meningkatkan ketrampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100)

8) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) pelayanan kesehatan (Prog.dukma/Giat 3072);
   b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062);
   c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern"**, yaitu:

1) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Alpalhankam Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067);
2) memenuhi rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

   pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog. modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062).

3) pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

   pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084).

4) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

4). meningkatkan…..

pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);

5) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084)
   b) membangun sistem komunikasi perbatasan dan pulau terluar (Prog.dukma/Giat 5055).
6) mengoptimalkan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/ pelaporan masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   pengembangan hotline 110 (Prog.dukma/Giat 5055).

f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I"**, yaitu:
   1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
      a) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.lidiksidik/Giat 3091);
      b) pengawasan penyidikan (Prog.dukma/Giat 5086);
   2) mengoptimalkan Saber Pungli (sapunbersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
      penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).
   3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
      a) penyelenggaraan pengamanan internat Polri (Prog.dukma/Giat 3089);

a). pengendalian…..

b) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.lidiksidik/Giat 3068);

4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   a) penyusunan kebijakan Polri (Prog.dukma/Giat 5051);
   b) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
   c) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.dukma/Giat 3068);
5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052).
6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
   Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053)

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2024

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1) Tujuan:
   Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:
   a) pelayanan administrasi keuangan Polresta Pontianak Polda Kalbar;
   b) penerangan masyarakat;
   c) penyelenggaraan teknologi informasi;
   d) pelayanan kesehatan Polresta Pontianak Polda Kalbar;

d) pelayanan…..

e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polresta Pontianak Polda Kalbar;
f) pertanggungjawaban profesi;
g) penyelenggaraan pengamanan internal Polresta Pontianak Polda Kalbar;
h) penegakan tata tertib dan disiplin Polresta Pontianak Polda Kalbar;
i) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
j) pengelolaan multimedia;
k) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
l) penyusunan dan penyuluhan hukum;
m) penyusunan kebijakan Polresta Pontianak Polda Kalbar;
n) reformasi dan birokrasi Polresta Pontianak Polda Kalbar;
o) manjemen anggaran;
p) pengelolaan informasi dan dokumentasi

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polresta Pontianak Polda Kalbar

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polresta Pontianak Polda Kalbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

a) pengembangan peralatan Polresta Pontianak Polda Kalbar;
b) dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
c) pengkajian dan strategi Sarpras;
d) pengembangan perbekalan umum;
e) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polresta Pontianak Polda Kalbar;
f) pengadaan Polresta Pontianak Polda Kalbar;

c. Program Profesionalisme SDM Polresta Pontianak Polda Kalbar

1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polresta Pontianak Polda Kalbar yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja

kinerja…..

yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) Kegiatan:
   a) dukungan manajemen dan teknis profesionalisme SDM Polresta Pontianak Polda Kalbar (usulan giat baru);
   b) pendidikan tinggi ilmu kepolisian;
   c) sekolah staf dan pimpinan menengah Polri;
   d) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri;
   e) pengkajian pengembangan pendidikan dan latihan Polri;
   f) pembinaan pendidikan dan latihan Polri;
   g) penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri;
   h) pengkajian dan strategi SDM Polresta Pontianak Polda Kalbar;
   i) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polresta Pontianak Polda Kalbar;
   j) pengendalian pegawai Polresta Pontianak Polda Kalbar;
   k) pembinaan karier personel Polresta Pontianak Polda Kalbar;
   l) pelayanan psikologi anggota Polresta Pontianak Polda Kalbar.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Tujuan:

   Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan:
   a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri;
   c) analisis keamanan;
   d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;

d) penyelenggaraan…..

e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
g) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
h) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus;
i) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
j) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
k) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
l) pembinaan potensi keamanan;
m) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
n) pengkajian dan strategi operasi kepolisian;
o) pembinaan operasi kepolisian;
p) pengendalian operasi kepolisian;
q) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
r) penanggulangan keamanan dalam negeri.

e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
penyelenggaraan laboratrium forensik;
c) penindakan tindak pidana umum;
d) penindakan tindak pidana Narkoba;
e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;

e) penindakan…..

f) penindakan tindak pidana korupsi;

g) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

h) penindakan tindak pidana tertentu;

i) koordinasi dan pengawasan PPNS;

j) pengawasan penyidikan;

k) penindakan tindak pidana lalu lintas.

2. Pagu Indikatif Polda Kalbar Tahun Anggaran 2024

a. alokasi Pagu Indikatif Polresta Pontianak Polda Kalbar T.A. 2024 sebesar Rp. 91.180.719.000,- (*Sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah*). Adapun rincian pagu Ideal Polda Kalbar T.A. 2024 sebagai berikut:

1) rincian Pagu Indikatif Polri T.A. 2024 per Jenis Belanja sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai : Rp. 63.153.516.000,-;

b) Belanja Barang : Rp. 28.027.203.000,-

c) Belanja Modal : Rp. -,-

2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2024 per sumber anggaran sebagai berikut:

a) Rupiah Murni : Rp. 86.816.904.000 ,-

b) PNBP : Rp. 4.363.815.000,-

3) Rincian Pagu Indikatif T.A. 2024 per Program sebagai berikut:

a) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 8.150.971.000-.

b) Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 5.245.190.000,-;

c) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 13.220.244.000,-;

d) Dukungan Manajemen Rp. 64.564.314.000,-;

b. kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polresta Pontianak Polda Kalbar T.A. 2024

1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan Intake Polresta Pontianak tahun 2024,

namun Pagu indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;

2) mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, pemeliharaan dan perawatan Command Center, kebutuhan werving Diktuk, daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);

3) mendukung kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat, serta untuk mendukung tercapainya prioritas Polresta Pontianak tahun 2024;

4) mendukung penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejolak/konflik sosial, penanganan flash point, terorisme, penyebaran berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, Almatsus Polresta Pontianak, pemenuhan fasilitas Polresta Pontianak, fasilitas kantor Satker baru, pemenuhan fasilitas Brimob serta pembangunan perumahan negara bagi personel Polri di Polresta Pontianak dan jajaran;

5) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polresta Pontianak baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin promoter dan presisi;

6) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;

7) meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair jajaran Polresta Pontianak Polda Kalbar;

8) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah perbatasan NKRI;

9) melaksanakan penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polresta Pontianak serta pemberian

9) melaksanakan…….

advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri di Polresta Pontianak;

10) mengakomodir dan mendukung kegiatan Program Prioritas Kapolda Kalbar yang terdiri dari:
   a) menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;
   b) perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0;
   c) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
   d) peningkatan kinerja penegakan hukum;
   e) penguatan penanganan konflik sosial;
   f) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
   g) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;
   h) pemantapan komunikasi publik;
   i) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
   j) penguatan fungsi pengawasan;
   k) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*public complain*).

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Kota Pontianak Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

ADNE HARIADI,S.I.K.,M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

KEPUTUSAN KAPOLRESTA PONTIANAK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	KET
1	2	3	4	5
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Pontianak	Indeks Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kota Pontianak	3.80	*Sasaran Impact*
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harkamtibmas	78,05	
2.	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	Indeks Gakkum	71,86	
3.	Profesionalisme SDM Polresta Pontianak	a. Indeks Profesionalitas SDM Polresta Pontianak	71,4	
4.	Modernisasi Teknologi	a. Persentase kepuasaan penggunaan Alkom	35	
		b. Persentase Pemenuhan Almatsus	47,72	
		c. Persepsi Kemudahan Akses Data	4	
5.	Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani	a. Nilai AKIP	70,91	
		b. Nilai Reformasi Birokrasi	90	
		c. Nilai Kinerja Anggaran	99,26	
		d. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	96,87	
		e. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polresta Pontianak	100	

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT
KEPALA
RESOR KOTA PONTIANAK

ADHE HARIADI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN "C" KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK
2. **VISI** : Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib
3. **MISI** : Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat
4. **PRIORITAS NASIONAL**
5. **SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**		13.220.244.000,-
01.01	**Indeks Harkamtibmas**	78,05	
02	**Penegakkan hukum secara berkeadilan**		8.150.971.000,-
02.01	**Indeks Gakkum**	71,86	
03	**Profesionalisme SDM**		
03.01	**Indeks Profesionalitas SDM Polri**	71,4	
04	**Modernisasi Teknologi**		5.245.190.000,-
04.01	**Survey Pemenuhan Alkom**	35	
04.02	**Persentase Pemenuhan Almatsus**	47,72	
04.04	**Persepsi kemudahan akses data**	5	
05	**Pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani**		64.564.314.000,-
05.01	**Nilai AKIP**	70,91	

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
05.03	**Nilai Reformasi Birokrasi**	90	
05.05	**Nilai Kinerja Anggaran**	95,58	
05.06	**Persentase penanganan pengaduan masyarakat**	96,87	
05.07	**Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri**	100	
Total			91.180.719.000,-

Pontianak, 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT
KEPALA
RESOR KOTA PONTIANAK

ADHE HARIADI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
060.BI	Program Penyelidikan danPenyidikan Tindak Pidana	8.150.971.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.150.971.000
060.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5.245.190.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.245.190.000
060.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan KetertibanMasyarakat	13.220.244.000	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.220.244.000
060.WA	Program Dukungan Manajemen	64.564.314.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.564.314.000
Total		91.180.719.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91.180.719.000

Pontianak, 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT
KEPALA
RESOR KOTA PONTIANAK

ADHE HARIADI,S.I.K.,M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN "C" KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**
2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : **03 - Profesionalisme SDM**
3. **PROGRAM** : **Program Profesionalisme SDM Polri**
4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	
07.05	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	
Total		

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional**		
01.01	**terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional**	71,4	
Total			

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	**SDM Polri yang Kompeten**	
01.01	**Persentase SDM Polri yang memenuhi kompetensi minimal**	
Total		

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3105	Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3108	Pembinaan Karier Personel Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pontianak, 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT KEPALA RESOR KOTA PONTIANAK

ADHIE HARYADI,S.I.K.,M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN "C" KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan
3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	0,0
07.05	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaannegara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi**		8.150.971.000,0
01.01	**Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.**	18,22	
01.02	**Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.**	21,55	
01.03	**Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,**	25,60	
01.04	**Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.**	0	
Total			8.150.971.000,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**layanan penegakkan hukum oleh Polri**	8.150.971.000,0
01.01	**Indeks Penegakkan hukum Polri**	
Total		8.150.971.000,0

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	15.865.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.865.000
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	9.317.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.317.000
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	6.045.999.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.045.999.000
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	1.236.547.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.236.547.000
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	730.750.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730.750.000
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	75.493.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.493.000
Total		8.150.971.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.150.971.000

Pontianak, 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT
KEPALA
RESOR KOTA PONTIANAK

ADNE HARIADI,S.I.K.,M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN "C" KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2024

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**
2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Modernisasi Teknologi**
3. **PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri**
4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	0,0
07.05	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal**		5.245.190.000,0
01.01	**persentase pemanfaatn Almatsus dan Sarpras**	35	
Total			5.245.190.000,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**Almatsus dan Sarpras**	5.245.190.000,0
01.01	**persentase pemebuhan Almatsus dan Sarpras**	
Total		5.245.190.000,0

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3084	Pengembangan Peralatan Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5059	Dukungan Manajemendan Teknik Sarpras	5.245.190.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.245.190.000
Total		5.245.190.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.245.190.000

Pontianak, 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT
KEPALA
RESOR KOTA PONTIANAK

ALHERTHARIADI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2024

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**
2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**
3. **PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**
4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
02	**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**	0,0
02.04	**Pembangunan Wilayah Kalimantan**	0,0
Total		0,0

5. **SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan**		13.220.244.000
01.01	**Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan**		
Total			13.220.244.000

6. **OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**	13.220.244.000
01.01	**Indeks Harkamtibmas**	
Total		13.220.244.000

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3112	Analisis Keamanan	329.634.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329.634.000
3114	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	373.370.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373.370.000
3115	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	276.490.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276.490.000
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang SosialBudaya	275.052.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275.052.000
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	183.783.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183.783.000
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4.923.589.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.923.589.000
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	555.025.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555.025.000
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	225.600.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.600.000
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat diBidang Lantas	1.785.044.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.785.044.000
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	1.907.842.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.907.842.000
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	260.750.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260.750.000
Total		13.220.244.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.220.244.000

Pontianak, 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

ARIF HARIADI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**
2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani**
3. **PROGRAM : Program Dukungan Manajemen**
4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	0,0
07.05	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan**		64.564.314.000
01.01	**persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas**		
Total			64.564.314.000

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	**layanan kepada internal Polri**	64.564.314.000
01.01	**Jumlah layanan yang di berikan sesuai SOP**	
Total		64.564.314.000

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3070	Penerangan Masyarakat	123.387.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123.387.000
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	64.215.531.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.215.531.000
3088	Pertanggungjawaban Profesi	28.146.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.146.000
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	29.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.000.000
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	25.459.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.459.000
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	42.756.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.756.000
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	25.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	22.680.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.680.000
5053	Reformasi Birokrasi Polri	42.910.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.910.000
Total			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

LAMPIRAN “C” KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 40 /VIII/2023

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5054	Manajemen Anggaran	6.445.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.445.000
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	3.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000
Total		64.564.314.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.564.314.000

Pontianak, 30 Agustus 2023

KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

POLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT
KEPALA
RESOR KOTA PONTIANAK

ADHE HARIADI, S.I.K., M.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552